

**PENGARUH UKURAN PEMERINTAH DAERAH, KEKAYAAN
PEMERINTAH DAERAH, TIPE PEMERINTAH DAERAH, BELANJA
DAERAH DAN OPINI AUDIT TERHADAP KETERSEDIAAN LKPD DI
WEBSITE PEMERINTAHAN DAERAH**

(Studi pada Pemerintah kabupaten dan kota Se-Sumatera)

SKRIPSI



Disusun Oleh :

OKTER KESUMA PUTRA

NPM : 1712129003P

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI & BISNIS

INSTITUT INFORMATIKA & BISNIS DARMAJAYA

BANDAR LAMPUNG

2021

**PENGARUH UKURAN PEMERINTAH DAERAH, KEKAYAAN
PEMERINTAH DAERAH, TIPE PEMERINTAH DAERAH, BELANJA
DAERAH DAN OPINI AUDIT TERHADAP KETERSEDIAAN LKPD DI
WEBSITE PEMERINTAHAN DAERAH**

(Studi pada Pemerintah kabupaten dan kota Se-Sumatera)

SKRIPSI



Disusun Oleh :

OKTER KESUMA PUTRA

NPM : 1712129003P

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI & BISNIS

INSTITUT INFORMATIKA & BISNIS DARMAJAYA

BANDAR LAMPUNG

2021

**PENGARUH UKURAN PEMERINTAH DAERAH, KEKAYAAN
PEMERINTAH DAERAH, TIPE PEMERINTAH DAERAH, BELANJA
DAERAH DAN OPINI AUDIT TERHADAP KETERSEDIAAN LKPD DI
WEBSITE PEMERINTAHAN DAERAH**

(Studi pada Pemerintah kabupaten dan kota Se-Sumatera)

SKRIPSI

Di Ajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar

SARJANA EKONOMI

Pada Program Studi Akuntansi

IIB Darmajaya Bandar Lampung



Disusun Oleh :

OKTER KESUMA PUTRA

NPM : 1712129003P

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI & BISNIS

INSTITUT INFORMATIKA & BISNIS DARMAJAYA

BANDAR LAMPUNG

2021



PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini, menyatakan bahwa skripsi yang saya ajukan ini adalah hasil karya saya sendiri, tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana di suatu perguruan tinggi atau karya pernah ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali secara tertulis dibaca dalam naskah ini dan disebut dalam daftar pustaka. Karya ini adalah milik saya dan pertanggung jawaban sepenuhnya berada dipundak saya.

Bandar Lampung, 27 Maret 2021

Okter Kesuma Putra
NPM.1712129003P

Judul Skripsi : **PENGARUH UKURAN PEMERINTAH DAERAH,
KEKAYAAN PEMERINTAH DAERAH, TIPE
PEMERINTAH DAERAH, BELANJA DAERAH DAN OPINI
AUDIT TERHADAP KETERSEDIAAN LKPD DI WEBSITE
PEMERINTAHAN DAERAH (Studi pada Pemerintah
kabupaten dan kota Se-Sumatera)**

Nama Mahasiswa : **Okter kesuma putra**

NPM : **1712129003P**

Program Study : **S1 AKUNTANSI**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dan dipertahankan dalam
sidang Tugas Penutup Studi guna memperoleh gelar **SARJANA
EKONOMI** pada **PROGRAM STUDI AKUNTANSI IIB
DARMAJAYA.**



Di setujui Oleh :

Pembimbing

ANIK IRAWATI, S.E., Msc

NIK. 01170305

Ketua Program Studi

ANIK IRAWATI, S.E., Msc

NIK. 01170305

Pada Maret 2021 telah diselenggarakan sidang skripsi dengan judul: **PENGARUH UKURAN PEMERINTAH DAERAH, KEKAYAAN PEMERINTAH DAERAH, TIPE PEMERINTAH DAERAH, BELANJA DAERAH DAN OPINI AUDIT TERHADAP KETERSEDIAAN LKPD DI WEBSITE PEMERINTAHAN DAERAH (Studi pada Pemerintah kabupaten dan kota Se-Sumatera)**. Untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik guna memperoleh gelar **SARJANA EKONOMI** bagi mahasiswa :

Nama : **Okter Kesuma Putra**

NPM : **1712129003P**

Jurusan : **AKUNTANSI**

Dan telah dinyatakan **Lulus** oleh Dewan Penguji yang terdiri dari :

Nama Status Tanda Tangan

1. **Reva Meiliana, S.E., M.Acc.** **Penguji I** _____

2. **Toni Nurhadianto, S.E., M.Sc.** **Penguji II** _____

Dekan Fakultas Bisnis Dan Ekonomi
IIB Darmajaya

Dr. Faurani Santi Singagerda, S.E., M.Sc.
NIK. 30040419

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Okter Kesuma Putra, dilahirkan di Tanjung Karang pada tanggal 07 Oktober 1998. Penulis merupakan anak kedua dari tiga bersaudara yang merupakan buah kasih pernikahan antara Bapak Syukur dan Ibu Agusnita.

Memulai Pendidikan di TK Dharmawanita Padang Cermin dan diselesaikan pada tahun 2004. Sekolah Dasar (SD) di SDN 1 Padang Cermin dan diselesaikan pada tahun 2010. Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP Kartika II-2 Bandar Lampung dan diselesaikan pada tahun 2013. Kemudian melanjutkan pendidikan ke Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMA Negeri 3 Bandar Lampung dan Lulus pada tahun 2016.

Tahun 2017, penulis terdaftar sebagai mahasiswa Jurusan Akuntansi pada Jenjang Strata satu di Institut Informatika Dan Bisnis (IIB) Darmajaya.

Bandar Lampung, 27 Maret 2020

Okter Kesuma Putra
NPM.1712129003P

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT.

Karena atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, Skripsi ini ku persembahkan sebagai bukti hasil jerih payah dalam perjuanganku serta cinta kasih sayangku kepada orang – orang yang sangat berharga dalam hidupku.

Ku persembahkan kepada :

KEDUA ORANG TUA KU

Untuk kedua orang tua ku Bapak Drs. Syukur & Ibu Agusnita, Terimakasih selalu memberikan do'a serta kesabarannya, dukungan baik moril maupun materil dan telah membesarkanku, menasehatiku, mendidik, mendukungku, serta membimbingku dengan segenap hatinya dan ketulusannya dari aku lahir sampai detik ini dan selalu memaafkan walaupun berulang kali kutorehkan luka di dalam hidupmu.

SAUDARA SEKELUARGA BESAR

Kakek, Nenek, Paman, Tante, Abang , Adik dan seluruh saudara-saudara sekeluarga besar

DOSEN PEMBIMBING

Anik Irawati selaku pembimbing skripsi yang telah memberikan banyak ilmu, cinta dan kasih sayangnya serta waktu, tenaga dan kesabarannya untuk membimbing saya menyelesaikan penelitian ini, Sehat selalu Bu Anik irawati, selalu di mudahkan rezekinya dan selalu dalam lidungan ALLAH SWT.

FOR ALL

Seluruh orang - orang yang ada di lingkungan sekitarku, Serta para pendidik, staff dan Almamaterku tercinta IIB Darmajaya. Terima kasih telah banyak membantu dan memberikan dukungan kepadaku.

MOTTO

Ambilah Kebaikan dari Apa yang Dikatakan, Jangan Melihat Siapa yang Mengatakannya

(Nabi Muhammad SAW)

Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving

(Albert Einstein)

Learn from yesterday, live for today and hope for tomorrow

(Albert Einstein)

Believe in yourself and know that there is something in you that is greater than any obstacle

(Christian D. Larson)

hidup seperti pohon pisang, tidak akan mati sebelum berbuah

(Okter kesuma putra)

ABSTRAK

PENGARUH UKURAN PEMERINTAH DAERAH, KEKAYAAN
PEMERINTAH DAERAH, TIPE PEMERINTAH DAERAH, BELANJA
DAERAH DAN OPINI AUDIT TERHADAP KETERSEDIAAN LKPD DI
WEBSITE PEMERINTAHAN DAERAH
(Studi pada Pemerintah kabupaten dan kota Se-Sumatera)

Oleh:

Okter kesuma putra
1712129003P

Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh ukuran pemerintah, kekayaan pemerintah, tipe pemerintah, belanja daerah dan opini audit terhadap ketersediaan LKPD di website pemerintah daerah (Studi pada Pemerintah kabupaten dan kota Se-Sumatera). Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Sumber data yang digunakan adalah data skunder yang berupa LKPD TA.2018. Metode pengumpulan data menggunakan penelitian metode dokumentasi yakni dengan menggunakan bantuan mesin untuk menyediakan data dengan catatan peristiwa tanpa kehadiran peneliti secara fisik. Populasi dalam penelitian ini adalah 120 kabupaten dan 34 kota Se-Sumatera. Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran pemerintah yang diukur berdasarkan jumlah asset pemerintah daerah, kekayaan daerah yang diukur berdasarkan pendapatan asli daerah (PAD), tipe pemerintah daerah yang berupa kabupaten dan kota, belanja daerah yang diukur berdasarkan jumlah realisasi belanja pemerintah daerah, dan opini audit yang berupa wajar tanpa pengecualian, wajar dengan pengecualian, tidak wajar dan tidak memberikan pendapat, tidak mampu berpengaruh signifikan terhadap ketersediaan LKPD di website pemerintah masing masing daerah.

Kata Kunci : Pengaruh ukuran pemerintah daerah, kekayaan pemerintah daerah, tipe pemerintah daerah, belanja daerah dan opini audit terhadap ketersediaan LKPD di *website* pemerinta daerah.

ABSTRACT

**THE EFFECT OF REGIONAL GOVERNMENT SIZE, LOCAL GOVERNMENT WEALTH, LOCAL GOVERNMENT TYPE, LOCAL SHOPPING, AND AUDIT OPINION ON THE AVAILABILITY OF LKPD ON THE LOCAL GOVERNMENT WEBSITE
(Study on Regency and City Governments throughout Sumatra)**

**By:
Okter Kesuma Putra
1712129003P**

The purpose of this study was to find the effect of government size, government wealth, type of government, regional spending, and audit opinion on the availability of Local Government Finance Report (*Bahasa: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)*) on local government websites (Studies on Regency and City Governments throughout Sumatra). The type of this study was a quantitative study. The data source used the secondary data in the form of LKPD FY 2018. The data collection method used the research documentation method by using the help of machines to provide data with event records without the physical presence of the researcher. The population in this study was 120 regencies and 34 cities in Sumatra. The sampling method in this study used the purposive sampling technique. The results of this study found that the size of the government was measured by the number of local government assets, regional wealth was measured by local revenue (*Bahasa: Pendapatan Asli Daerah (PAD)*), the type of local government in the form of districts and cities, regional expenditures were measured by the amount of realized local government spending, and the audit opinion. Furthermore, qualified, unqualified, and not giving an opinion, were not able to significantly affect the availability of LKPD on the government websites of each region.

Keywords: Government Size, Government Wealth, Type of Government, Regional Spending, Audit Opinion, Availability of Local Government Finance Report

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. Karena atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang merupakan tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Jurusan Akuntansi IIB Darmajaya Bandar Lampung.

Dalam penyusunan skripsi ini telah banyak pihak yang turut membantu sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan sebaik - baiknya. Untuk itu pada kesempatan kali ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Ir. Hi. Firmansyah YA, MBA., MSc, selaku Rektor IIB Darmajaya.
2. Bapak Dr. RZ. Abdul Aziz, S.T., M.T, selaku Wakil Rektor I IIB Darmajaya.
3. Bapak Ronny Nazar, S.E.,M.M, selaku Wakil Rektor II IIB Darmajaya.
4. Bapak Muprihan Thaib, S.Sos., M.M, selaku Wakil Rektor III IIB Darmajaya
5. Bapak Prof. Dr. Ir. RA. Bustomi Rosadi, M.S, selaku Wakil Rektor IV IIB Darmajaya.
6. Ibu Dr. Faurani I Santi Singagerda S.E., M.Sc, selaku Fakultas Ekonomi dan Bisnis IIB Darmajaya.
7. Ibu Anik Irawati.,SE.,Msc selaku Ketua Program Studi Manajemen IIB Darmajaya.
8. Ibu Anik Irawati., SE.,Msc selaku Dosen pembimbing skripsi
9. Ibu Reva Meiliana.,SE.,M.Acc Selaku penguji 1, terima kasih atas penilaiannya
10. Bapak Toni Nurhadiyanto.,SE.,M.Sc Selaku penguji 2, terima kasih atas penilaiannya

11. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar terutama Program Studi Akuntansi yang telah membagi ilmu dan pengetahuan mereka yang bermanfaat kepada penulis dalam pembelajaran, serta seluruh Staff IIB Darmajaya Para Sahabatku (Tiger tri sakti, Aji ghafar, Egi adesan, Mas Eki, Bagus setiawan, Rio Andrean, Aji Hafizon, Ayu triana, Herwindy, Reiza kurniawan, Riko Kurniawan, Lutfi Bimantoro, Romeo roby, Salsabilla fuliantira, Shyfa andini,), yang selalu menemaniku dengan canda dan tawa dari awal kuliah sampai lulus kuliah semoga kita sukses semua.
12. Sahabat dan Teman-teman Di luar kampus.
13. Seluruh angkatan Akuntansi 2017 yang selalu mendukung dan selalu bekerja bersama-sama dalam menyelesaikan tugas skripsi serta seluruh pihak yang telah membantu penyusun baik secara langsung maupun tidak langsung.
14. Almamaterku IIB Darmajaya Bandar Lampung

Penulis menyadari bahwa didalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan sehingga masih jauh dari kesempurnaan. Semua ini tidak luput dari keterbatasan penulis, terutama dalam membuat suatu karya tulis. Adanya kekurangan tersebut tidak menutup kemungkinan timbulnya kritik serta saran dari berbagai pihak dan hal ini memang sangat penulis harapkan sehingga akan lebih memberikan pengetahuan kepada penulis yang jauh lebih baik untuk kesempurnaan tulisan dimasa yang akan datang.

Bandar Lampung, 27 Maret 2021

Penulis,
Okter kesuma putra

DAFTAR ISI

	Halaman
RIWAYAT HIDUP	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
MOTTO	ix
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
KATA PENGANTAR	xii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Ruang Lingkup Penelitian.....	8
1.3 Rumusan Masalah	8
1.4 Tujuan Penelitian.....	8
1.5 Manfaat Penelitian.....	9
1.5.1 Manfaat Teoritis.....	9
1.5.2 Manfaat Praktis	9
1.6 Sistematika Penulisan	10
BAB II	12
LANDASAN TEORI	12
2.1. Agency Theory	12
2.2. Teori pendukung.....	12
2.3. Ketersediaan LKPD Pemerintahan daerah.....	14
2.3.1 Komponen	14
2.4. Ukuran pemerintahan daerah.....	20
2.5. Kekayaan Pemerintahan Daerah.....	21
2.6. Tipe Pemerintahan Daerah.....	22
2.7. Belanja daerah	23

2.8.	Opini Audit.....	24
2.9.	Penelitian Terdahulu	27
2.10.	Kerangka Konseptual dan Pengembangan Hipotesis.....	31
2.10.1	Pengaruh Ukuran Pemerintahan Daerah terhadap Ketersediaan LKPD	32
2.10.2	Pengaruh Kekayaan Pemerintahan Daerah terhadap Ketersediaan LKPD	33
2.10.3	Pengaruh Tipe Pemerintahan Daerah terhadap Ketersediaan LKPD ..	34
2.10.4	Pengaruh Belanja Daerah terhadap Ketersediaan LKPD	34
2.10.5	Pengaruh Opini Audit terhadap Ketersediaan LKPD	35
BAB III	36
METODE PENELITIAN	36
3.1	Sumber Data.....	36
3.2	Metode Pengumpulan Data.....	36
3.3	Populasi dan Sampel.....	36
3.3.1	Populasi	36
3.3.2	Sampel	37
3.4	Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel.....	37
3.4.1	Variabel Penelitian	37
3.4.2	Definisi Operasional Variabel	38
3.5.	Metode Analisis Data	43
3.5.1	Analisis Statistik Deskriptif	43
3.5.2	Uji Hipotesis	44
3.5.3	Uji Kelayakan Model	45
3.5.4	Uji -2 log likelihood	45
3.5.5	Uji Nagelkerke R Square.....	45
3.5.6	Uji Hosmer and Lemeshow	46
BAB IV	47
HASIL DAN PEMBAHASAN	47
4.1	Statistik Deskriptif.....	47
4.2	Hasil Pengujian Hipotesis	50
4.2.1	Uji -2 log Likelihood.....	50
4.2.2	Uji Nagelkerke R Square.....	52

4.2.3 Uji Hosmer dan Lemeshow Test.....	52
4.2.4 Uji Logistik secara Parsial.....	53
4.3 Pembahasan.....	54
4.3.1 Pengaruh Ukuran Pemerintah Terhadap Ketersediaan LKPD diwebsite Pemerintah Daerah.....	54
4.3.2 Pengaruh Kekayaan Pemerintah Terhadap Ketersediaan LKPD di website Pemerintah Daerah.....	55
4.3.3 Pengaruh tipe pemerintah terhadap ketersediaan LKPD di website pemerintah daerah.....	55
4.3.4 Pengaruh belanja daerah terhadap ketersediaan LKPD di website pemerintah daerah.....	56
4.3.5 Pengaruh opini audit terhadap ketersediaan LKPD di website pemerintah daerah.....	57
BAB V.....	58
KESIMPULAN DAN SARAN.....	58
5.1 Kesimpulan	58
5.2 Keterbatasan penelitian.....	58
5.3 Saran	59

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

- 1.1 Tabel provinsi dengan laporan dugaan korupsi tertinggi tahun 2014
- 1.2 Tabel kelemahan SPI Hasil Pemeriksaan LKPD LHP BPK Tahun 2015
- 2.1 Tabel penelitian terdahulu
- 3.1 Tabel definisi operasional
- 4.0 Tabel jumlah kabupaten dan kota Se- Sumatera
- 4.1 Tabel statistic deskriptif
 - 4.1.1 Tabel Frekuensi variable tipe pemerintah
 - 4.1.2 Tabel frekuensi variable opini audit
 - 4.1.3 Tabel frekuensi variable ketersediaan LKPD
- 4.2.1.A Tabel uji -2 log likelihood step 0
- 4.2.1.B Tabel uji -2log likelihood step 1
- 4.2.2 Tabel uji Negelkerke R square
- 4.2.3 Tabel uji Hosmer and Lemeshow
- 4.2.4 Tabel uji Logistik parsial

DAFTAR GRAFIK

1.1 Perkembangan opini LKPD berdasarkan tingkat pemda 2015

DAFTAR GAMBAR

2.1 Gambar kerangka konseptual

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peningkatan transparansi di Indonesia mulai di perhatikan dan berkembang dengan dikeluarkannya Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan, hak setiap orang untuk memperoleh Informasi, kewajiban Badan Publik menyediakan dan melayani permintaan Informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan / proporsional, dan cara sederhana, pengecualian bersifat ketat dan terbatas, kewajiban Badan Publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan Informasi.

Dalam undang-undang tersebut telah mengatur seluruh jajaran pejabat publik menjadi lebih transparan, bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan publik yang sebaik-baiknya. Undang-undang ini menyebutkan bahwa pemerintah berkewajiban untuk menyebarkan informasi publik dengan cara yang mudah dijangkau masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami oleh pemakai informasi.

Pada era globalisasi seperti saat ini, penggunaan media *internet* untuk menyampaikan informasi berkembang sangat pesat dan luas. Hal ini sejalan dengan semakin bertambahnya jumlah pengguna media *internet* di tengah masyarakat. Saat ini, *internet* sudah menjadi kebutuhan yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Dengan Berjalannya waktu, banyak perusahaan yang sudah menggunakan *internet* sebagai media dalam menyampaikan informasi akuntansinya. Akan tetapi, hal tersebut sepertinya belum menjadi perhatian pihak pemerintah di Indonesia.

Saat ini, *website* dari sebagian besar pemerintah daerah di Indonesia justru kurang begitu *update* dan diperhatikan, khususnya dari sisi pengungkapan informasi akuntansi. Di Indonesia, bentuk pertanggung jawaban pengelolaan keuangan yang

wajib dilakukan oleh pemerintah daerah hanyalah sebatas menyampaikan laporan keuangan pemerintah daerah kepada DPRD yang disusun menurut standar akuntansi pemerintahan (SAP).

Dengan disahkannya Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang mengatur bahwa pejabat publik harus lebih transparan, bertanggungjawab dan lebih berorientasi kepada pelayanan masyarakat, sudah seharusnya pemerintah daerah melaporkan hasil kinerja keuangannya sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan transparansi informasi kepada masyarakat. Suatu pemerintahan daerah yang transparan dan *akuntabel* seharusnya mampu menyediakan informasi yang terbuka bagi masyarakat.

10 Provinsi dengan Laporan Dugaan Korupsi Tertinggi yang dilaporkan ke KPK (Tahun 2004 – 2012)

No.	Propinsi	Jumlah Laporan
1	DKI Jakarta	10.738
2	Jawa Timur	5.655
3	Sumatera Utara	5.207
4	Jawa Barat	4.725
5	Jawa Tengah	3.814
6	Sumatera Selatan	2.706
7	Riau	1.787
8	Sulawesi Selatan	1.780
9	Kalimantan Timur	1.742

10	Jambi	1.293
<p>Sumber: KPK 2012 (total laporan yang masuk ke KPK = 57.964)</p> <p>1.1 Tabel Provinsi dengan Laporan Dugaan Korupsi Tertinggi yang dilaporkan ke KPK</p>		

Berdasarkan data yang dirilis KPK tahun 2004-2012 terdapat 4 Provinsi di Sumatera yang termasuk didalam 10 provinsi dengan laporan dugaan korupsi tertinggi yang dilaporkan ke KPK. Provinsi Sumatera utara menempatkan peringkat ke-3 dengan jumlah laporan 5.207, Provinsi Sumatera selatan sebanyak 2.706 laporan, Provinsi Riau sebanyak 1.787 laporan, dan Provinsi jambi 1.293 laporan. Hal ini dapat diartikan bahwa Transparansi yang ada pada pemerintahan pulau Sumatera masih belum terlaksana sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Styles dan Tennyson (2007) mengatakan bahwa internet adalah media yang paling mudah dijangkau oleh masyarakat dan sarana yang paling *cost effective* bagi pemerintah untuk mempublikasikan informasi keuangannya dalam bentuk pelaporan *online*. Fenomena pengembangan praktek pelaporan *online* termotivasi oleh perkembangan *world wide web* sejak tahun 1994 dan internet menjadi media utama untuk pelaporan *online*. Di Indonesia, penggunaan internet akan sangat membantu dalam menyukseskan program *e-government* dalam membangun sistem informasi keuangan daerah. Internet menjadi teknologi yang berperan dalam proses penyediaan dan perpindahan informasi pemerintah daerah dengan pemerintah pusat dan kepada pihak lain, misalnya warga masyarakat, ataupun sebaliknya. Pemanfaatan internet dalam suatu institusi dapat membuat pekerjaan menjadi efektif dan efisien.

Data yang dirilis oleh *United Nation* mengenai *E-Government Development Index* (EGDI) tahun 2018 menempatkan Indonesia pada peringkat ke-107 EGDI. Posisi ini meningkat 9 peringkat dibandingkan tahun 2016 yang menduduki peringkat 116. Akan tetapi untuk kawasan Asia Tenggara, peringkat Indonesia masih sama dengan tahun sebelumnya yakni menduduki peringkat

ke-7. Indonesia masih berada dibawah negara seperti Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, Thailand, Filipina dan Vietnam. Kemudian untuk nilai rata-rata EDGI, Indonesia juga masih berada dibawah rata-rata untuk *regional* Asia Tenggara (Widowati, 2018).

E-government menjadi inovasi baru bagi pemerintah untuk mempermudah proses penyelenggaraan pemerintahan demi memberikan pelayanan prima terhadap masyarakat. Indrajit (2001) mengatakan bahwa *e-government* menjadi pengembangan baru yang mengubah interaksi masyarakat dengan pemerintah maupun pemerintah dengan dunia bisnis (Latif,Wahyu&Surjono,2012). *E-government* didefinisikan oleh *World Bank* sebagai pemanfaatan teknologi informasi oleh lembaga pemerintah yang dapat mentransformasikan hubungan antara pemerintah dengan masyarakat, dunia bisnis maupun dengan lembaga pemerintahan lain (Napitupulu, 2015).

Mengacu pada tingginya kebocoran pada keuangan Negara, maka laporan keuangan pemerintah setiap tahunnya mendapat penilaian berupa opini dari Badan Pengawas Keuangan (BPK). Ketika BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap laporan keuangan pemerintah daerah, artinya dapat dikatakan bahwa laporan keuangan suatu entitas pemerintah daerah tersebut disajikan dan diungkapkan secara wajar dan berkualitas. Dari hasil pemerikaan BPK RI atas laporan keuangan Tahun 2015 pada kabupaten/kota Se- Sumatera menunjukkan adanya 154 kasus kelemahan SPI di pemerintah yang terdiri atas kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, serta pada kelemahan struktur pengendalian intern. Selain itu, ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan sebanyak 212 kasus senilai Rp.316.865.766.994 (LHP BPK RI 2015). Daftar jumlah kasus kelemahan SPI atas laporan keuangan pemerintah daerah dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Daftar Kelemahan SPI Hasil Pemeriksaan LKPD LHP BPK Tahun 2015

(Kabupaten/Kota Se-Sumatera)

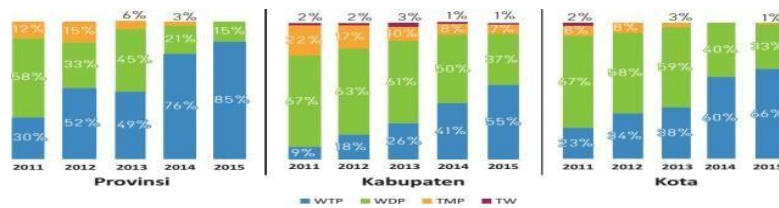
No	Kabupaten/ Kota	Opini	Jumlah kasus temuan SPI	Jumlah temuan kepatuhan	
				Kasus	RP
1	Kab. Aceh Barat	WTP	9	11	1.647.921.538
2	Kab. Aceh Besar	WTP	4	12	17.804.756.620
3	Kab. Aceh Jaya	WTP	9	9	13.633.878.659
4	Kab. Aceh Timur	WTP	7	12	25.406.908.870
5	Kab. Dharmasraya	WTP	8	12	20.854.013.687
6	Kab. Pasaman	WTP	6	13	6.947.562.108
7	Kab. Bengkalis	WTP	10	15	36.807.772.562
8	Kab. Kepulauan Meranti	WTP	10	12	5.611.726.878
9	Kab. Kuantan Singingi	WTP	6	17	13.648.268.727
10	Kab. Pelalawan	WTP	7	11	21.390.810.922
11	Kab. Siak	WTP	9	9	5.275.956.280
12	Kab. Musi Banyuasin	WTP	9	10	22.266.291.018
13	Kab. Ogan Komering Ulu	WTP	9	8	12.190.890.577
14	Kota Pagar Alam	WTP	8	12	4.829.988.193
15	Kota Palembang	WTP	9	18	33.507.899.228
16	Kab. Karo	WDP	5	5	682.011.053
17	Kab. Langkat	WDP	7	5	6.987.841.536
18	Kab. Lampung Selatan	WDP	6	5	15.297.207.848
19	Kab. Lampung Tengah	WDP	6	7	23.855.127.952
20	Kab. Ogan Ilir	WDP	5	4	15.479.871.238
21	Kab. Natuna	WDP	5	5	12.739.061.500

Sumber : LHP BPK-RI Tahun 2015, data diolah

1.2 Tabel Daftar Kelemahan SPI Hasil Pemeriksaan LKPD LHP BPK Tahun 2015

Pada tabel di atas terlihat di beberapa kabupaten/kota yang mendapatkan hasil pemeriksaan berupa opini audit WTP, justru jumlah kasus dan nominal temuan lebih besar dari beberapa kabupaten yang mendapat opini WDP. Fenomena ini menjadi kontradiktif dengan apa yang dinyatakan BPK dalam IHP 2014. Munculnya fenomena ini memberi signal bahwa standar pemeriksaan belum berfungsi sebagai mana mestinya

Perkembangan Opini LKPD Berdasarkan Tingkat Pemda 2011 - 2015



Sumber : BPK-RI melalui publikasi www.bpk.go.id diakses 12 januari 2021

1.1 Grafik Perkembangan Opini LKPD Berdasarkan Tingkat Pemda 2015

Dari grafik di atas terlihat, kenaikan opini dari tahun sebelumnya terjadi pada seluruh level pemerintahan. Pada tahun 2015 untuk pemerintah provinsi, opini WTP bertambah dari 26 LKPD menjadi 29 LKPD. Begitu pula untuk pemerintah kabupaten bertambah dari 170 LKPD menjadi 223 LKPD, pada pemerintah kota dari 56 LKPD menjadi 60 LKPD. Kenaikan opini dari WDP menjadi WTP pada 84 LKPD dan dari TW/ TMP menjadi WDP pada 17 LKPD hal ini disebabkan karena pemda telah menindak lanjuti hasil pemeriksaan BPK tahun 2014 dengan melakukan perbaikan atas kelemahan sistem pengendalian intern maupun ketiaktahuan terhadap peraturan perundang- undangan sehingga akun- akun disajikan dan diungkapkan sesuai dengan SAP.

Dari hasil uraian diatas yang dapat dilihat dari kejadian yang ada adalah saat ini hampir semua pemda di Indonesia terutama di daerah Sumatera memiliki *website* sebagai wadah informasi bagi masyarakat. Media ini dapat dimanfaatkan oleh pemerintah untuk melaporkan laporan keuangannya kepada masyarakat luas. Menyatakan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah dapat menggunakan media internet untuk menyajikan dan melakukan *diseminasi* laporan keuangannya. Penyampaian laporan keuangan melalui internet juga dinilai memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat dan pemerintah sendiri. Bagi pemerintah, pengungkapan laporan keuangan melalui media *internet* dapat meningkatkan motivasi pemerintah dalam menyusun laporan keuangan yang baik disamping dapat mengurangi biaya pelaporan yang cukup tinggi.

Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur tentang pengungkapan pelaporan keuangan di *internet* secara berkesinambungan oleh pemerintah daerah di Indonesia. Beberapa penelitian, seperti penelitian Trisnawati dan Komarudin (2014) menunjukkan bahwa kompetisi politik, ukuran pemerintahan daerah, rasio pembiayaan utang (*leverage*), dan total kekayaan pemerintahan daerah berpengaruh positif terhadap publikasi laporan keuangan pemerintahan daerah. Sementara penelitian yang dilakukan oleh Laswad, meneliti faktor *leverage*, kompetisi politik, kekayaan daerah, *visibilitas* pers, tipe pemerintahan, dan ukuran otoritas lokal terhadap pelaporan laporan keuangan pemerintah di internet secara berkesinambungan. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa leverage, kekayaan daerah, visibilitas pers, dan tipe pemerintahan memiliki pengaruh yang positif sedangkan kompetisi politik dan ukuran pemerintah daerah memiliki pengaruh yang negatif.

Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan, penelitian-penelitian sebelumnya juga memiliki kombinasi variabel independen yang berbeda-beda. Karena itu, dianggap perlu untuk melakukan penelitian lebih lanjut untuk mendapatkan referensi atas faktor-faktor yang mempengaruhi ketersediaan LKPD pemerintahan daerah, khususnya di Indonesia yang memang belum banyak penelitian tentang hal ini. Penelitian ini merupakan *replica* dari (Nazura Meutia, 2016) yang berjudul pengaruh ukuran pemerintah daerah, kekayaan pemerintah daerah, tipe pemerintah daerah, dan opini audit terhadap ketersediaan LKPD di situs pemerintahan daerah pada kabupaten/kota di Sumatera. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya dengan menambahkan variabel belanja daerah, mengganti daerah yang diteliti, dan menggunakan LKPD kabupaten/kota Se-Sumatera. Penambahan variabel berdasarkan penelitian (Christina, 2016) yang mengungkap bahwa belanja daerah berpengaruh tidak signifikan terhadap pelaporan keuangan daerah. Berdasarkan latar belakang dan uraian permasalahan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul; **“Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Kekayaan Pemerintah Daerah, Tipe Pemerintah Daerah, Belanja Daerah dan Opini Audit Terhadap Ketersediaan LKPD Pada Situs Pemerintahan Daerah di Kabupaten dan Kota Se-Sumatera”**.

1.2 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian untuk melihat pengaruh variabel-variabel tersebut dengan melibatkan Organisasi Perangkat daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Sumatera yang mana adalah pelaksana fungsi eksekutif yang harus berkoordinasi agar dalam memaparkan laporan keuangan pemerintahan berjalan dengan baik.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah ukuran pemerintah daerah berpengaruh terhadap ketersediaan LKPD pada pemerintahan daerah kabupaten/kota Se-Sumatera?
2. Apakah kekayaan pemerintah daerah berpengaruh terhadap ketersediaan LKPD pada pemerintahan daerah kabupaten/kota Se-Sumatera?
3. Apakah tipe pemerintah daerah berpengaruh terhadap ketersediaan LKPD pada pemerintahan daerah kabupaten/kota Se-Sumatera?
4. Apakah belanja daerah pemerintah daerah berpengaruh terhadap ketersediaan LKPD pada pemerintahan daerah kabupaten/kota Se-Sumatera?
5. Apakah opini audit berpengaruh terhadap ketersediaan LKPD pada pemerintahan daerah kabupaten/kota Se-Sumatera?

1.4 Tujuan Penelitian

- A. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh ukuran pemerintah daerah terhadap ketersediaan LKPD pada pemerintahan daerah kabupaten/kota Se-Sumatera
- B. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh kekayaan pemerintah daerah terhadap ketersediaan LKPD pada pemerintahan daerah kabupaten/kota Se-Sumatera

- C. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh tipe pemerintah daerah terhadap ketersediaan LKPD pada pemerintahan daerah kabupaten/kota Se-Sumatera
- D. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh belanja daerah pemerintah daerah terhadap ketersediaan LKPD pada pemerintahan daerah kabupaten/kota Se-Sumatera
- E. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh opini audit terhadap ketersediaan LKPD pada pemerintahan daerah kabupaten/kota Se-Sumatera

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1.5.1 Manfaat Teoritis

- 1. Hasil Penelitian dapat menjadi sumber referensi dan sebagai sumbangan konseptual bagi penelitian selanjutnya khususnya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis IIB Darmajaya.
- 2. Hasil penelitian dapat memperkuat penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Kekayaan Pemerintah Daerah, Tipe Pemerintah Daerah, Belanja daerah dan Opini Audit Terhadap Ketersediaan LKPD Pada Pemerintahan Se-Sumatera.

1.5.2 Manfaat Praktis

- 1. Bagi Peneliti
Meningkatkan wawasan dan pengetahuan peneliti tentang Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Kekayaan Pemerintah Daerah, Tipe Pemerintah Daerah, Belanja daerah dan Opini Audit Terhadap Ketersediaan LKPD Pada Pemerintahan Se-Sumatera.
- 2. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam menyikapi tentang Keterbukaan Informasi Publik yang mengatur bahwa pejabat publik harus lebih transparan, bertanggungjawab dan lebih berorientasi kepada pelayanan masyarakat, sudah seharusnya pemerintah daerah melaporkan hasil kinerja keuangannya sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan transparansi informasi kepada masyarakat.

3. Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dikembangkan mahasiswa dalam penelitian selanjutnya serta mahasiswa dalam penelitian selanjutnya serta membantu mahasiswa dalam meningkatkan pemahamannya berkaitan dengan ilmu akuntansi dan penerapannya .

1.6 Sistematika Penulisan

Pembahasan dalam skripsi ini akan disajikan dalam lima bab yang berurutan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini berisi uraian tentang teori-teori yang berkaitan dengan Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Kekayaan Pemerintah Daerah, Tipe Pemerintah Daerah, Belanja daerah dan Opini Audit Terhadap Ketersediaan LKPD Pada Situs Pemerintahan.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini menguraikan tentang variabel-variabel penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang analisis menyeluruh atas penelitian yang dilakukan. Hasil analisis statistik diinterpretasikan dan pembahasan dikaji secara mendalam hingga tercapai hasil analisis dari penelitian

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini penulis membahas secara singkat mengenai kesimpulan berdasarkan hasil analisis data, saran dan keterbatasan dari hasil penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Agency Theory

Pemerintah adalah sebuah organisasi yang besar dan kompleks, sebagai sebuah organisasi yang besar maka pemerintah harus dikelola dengan baik. Pengelolaan organisasi pemerintah sebagaimana organisasi sektor swasta dikelola oleh sekelompok orang yang diberi kepercayaan untuk mengelola organisasi. Pada sektor swasta para stakeholder yang disebut *principal* dan orang yang diberi kuasa disebut *agent*. Teori tersebut dikenal dengan *agency theory*

Penelitian Jensen dan Meckling (1976) dan Ross (1973) menyatakan bahwa hubungan keagenan merupakan kontrak yang melibatkan satu atau lebih *principal* dengan *agent* untuk melaksanakan pekerjaan yang melibatkan sebagian pelimpahan wewenang dalam pengambilan keputusan dari *principal* kepada *agent*. Pelimpahan sebagian wewenang dari *principal* kepada *agent* akan mengakibatkan *agent* tidak selalu bertindak sesuai dengan keinginan dari *principal* karena *agent* mempunyai kepentingan sendiri.

Agency theory tidak terlepas dari hubungan pemerintah kepada masyarakat yaitu tentang keterbukaan informasi publik yang sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan, hak setiap orang untuk memperoleh Informasi, kewajiban Badan Publik menyediakan dan melayani permintaan Informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan / proporsional, dan cara sederhana, pengecualian bersifat ketat dan terbatas, kewajiban Badan Publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan Informasi.

2.2. Teori pendukung

Legitimacy Theory dalam Pemerintahan

Teori legitimasi seringkali digunakan untuk menjelaskan aktivitas perusahaan dalam pengungkapan informasi sukarela kepada para stakeholdernya, umumnya

informasi sosial dan lingkungan (Suchman 1995). Dikaitkan kedalam bidang pemerintah, legitimasi merupakan suatu kondisi dimana tingkah laku pemerintah sesuai dengan norma dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat, sehingga akan tercipta kepercayaan atas kebijakan dan keputusan pemerintah. Adanya perbedaan antara aktivitas pemerintah dengan nilai yang berlaku dalam masyarakat akan menimbulkan adanya *legitimacy gap* yang mengancam kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah (Haniffa & Cooke, 2005). Disisi lain, norma dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat tidaklah bersifat konstan, ada perubahan nilai-nilai yang dianut, sehingga entitas harus dapat menyesuaikan dengan persepsi baru yang dianut masyarakat (Tilling & Tilt, 2010).

Legitimasi suatu entitas bergantung pada ekspektasi masyarakat mengenai kinerja entitas yang bersangkutan. Dalam menjaga legitimasi tersebut, hal yang paling krusial adalah komunikasi dengan masyarakat karena dengan begitu masyarakat diperlihatkan atas aktivitas dan kinerja yang dilakukan oleh pemerintah (Lindblom, 1994). Terdapat empat strategi komunikasi yang dapat dilakukan dalam menjaga legitimasi entitas (Lindblom, 1994), yaitu:

- 1) Berusaha untuk mendidik dan memberitahu masyarakat tentang perubahan dalam kinerja dan aktivitas entitas. Pemberitahuan atas perubahan yang terjadi dalam entitas dapat mengurangi *legitimacy gap* atas aktivitas yang tidak sesuai dengan ekspektasi masyarakat
- 2) Mencoba mengubah persepsi masyarakat atas entitas yang bersangkutan
- 3) Memanipulasi persepsi dengan mengalihkan perhatian publik terhadap isu baru.
- 4) Mengubah ekspektasi eksternal mengenai kinerja entitas.

Salah satu bentuk komunikasi yang dapat dilakukan oleh entitas pemerintah dalam menjaga dan memperkuat legitimasinya terhadap publik adalah dengan penyampaian informasi kinerjanya secara berkala. Pemerintah diwajibkan menyampaikan laporan pelaksanaan aktivitasnya diantaranya laporan keuangan (LK), laporan kinerja (LAKIP), dan laporan pelaksanaan pemerintah daerah

(LPPD) bagi pemerintah daerah. Website resmi instansi pemerintah dapat digunakan sebagai media yang efisien dalam memberikan sinyal baik atas kinerja pemerintah sehingga meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.

2.3. Ketersediaan LKPD Pemerintahan daerah

Laporan Keuangan Daerah merupakan informasi yang memuat data berbagai elemen struktur kekayaan dan struktur finansial yang merupakan pencerminan hasil aktivitas tertentu. Istilah "*Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*" meliputi semua laporan dan berbagai penjelasannya yang mengakui laporannya tersebut akan diakui sebagai bagian dari laporan keuangan. Untuk menyusun laporan keuangan ini, Pemerintah Daerah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (PP Nomor 24 Tahun 2004) Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

2.3.1 Komponen

Berdasarkan SAP Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, komponen-komponen yang terdapat dalam laporan keuangan pokok terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan realisasi anggaran menyajikan *ikhtisar* sumber, alokasi dan pemakaian sumber alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasi dalam suatu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung oleh Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari pendapatan, belanja, *transfer* dan pembiayaan.

- a) Pendapatan (basis kas) adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu di bayar kembali oleh pemerintah.
- b) Pendapatan (basis akrual) adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.

- c) Belanja (basis kas) adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- d) Belanja (basis akrual) adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
- e) Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
- f) Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.
- g) Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil *divestasi*. Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL) menyajikan pos-pos berikut, yaitu: saldo anggaran lebih awal (saldo tahun sebelumnya), penggunaan saldo anggaran lebih, Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (*SILPA/SIKPA*) tahun berjalan, koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya, lain-lain dan Saldo anggaran lebih akhir untuk periode berjalan. Pos-pos tersebut disajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya. LP-SAL dimaksudkan untuk memberikan ringkasan atas pemanfaatan saldo anggaran dan pembiayaan pemerintah, sehingga suatu entitas pelaporan harus menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam LP-SAL dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Struktur LP-SAL baik pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota tidak memiliki perbedaan.

3. Laporan Operasional

Laporan Operasional (LO) menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya. Pengguna laporan membutuhkan Laporan Operasional dalam mengevaluasi pendapatan-LO dan beban untuk menjalankan suatu unit atau seluruh entitas pemerintahan. Berkaitan dengan kebutuhan pengguna tersebut, Laporan Operasional menyediakan informasi sebagai berikut:

- a) Mengenai besarnya beban yang harus ditanggung oleh pemerintah untuk menjalankan pelayanan;
- b) Mengenai operasi keuangan secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi, efektivitas, dan kehematan perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- c) Yang berguna dalam memprediksi pendapatan-LO yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif;
- d) Mengenai penurunan ekuitas (bila defisit operasional), dan peningkatan ekuitas (bila surplus operasional).

Laporan Operasional disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (*full accrual accounting cycle*) sehingga penyusunan Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hubungannya dengan laporan operasional, kegiatan operasional suatu entitas pelaporan dapat dianalisis menurut klasifikasi ekonomi atau klasifikasi fungsi/program untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Laporan operasional yang dianalisis menurut suatu klasifikasi ekonomi, beban-beban dikelompokkan menurut klasifikasi ekonomi (sebagai contoh beban penyusutan/*amortisasi*, beban alat tulis kantor, beban transportasi, dan beban gaji dan tunjangan pegawai), dan tidak direalokasikan pada berbagai fungsi dalam suatu entitas pelaporan.

Metode ini sederhana untuk diaplikasikan dalam kebanyakan entitas kecil karena tidak memerlukan alokasi beban operasional pada berbagai fungsi. Akan tetapi jika suatu laporan operasional yang dianalisis menurut fungsinya, beban-beban dikelompokkan menurut program atau yang dimaksudkan. Penyajian laporan ini memberikan informasi yang lebih relevan bagi pemakai dibandingkan dengan laporan menurut klasifikasi ekonomi, walau dalam hal ini pengalokasian beban ke setiap fungsi adakalanya bersifat *arbitrer* dan atas dasar pertimbangan tertentu. Dalam memilih penggunaan kedua metode klasifikasi beban tersebut tergantung pada faktor historis dan peraturan perundang-undangan, serta hakikat organisasi. Kedua metode ini dapat memberikan indikasi beban yang mungkin berbeda dengan output entitas pelaporan bersangkutan, baik langsung maupun tidak langsung.

Karena penerapan masing-masing metode pada entitas yang berbeda mempunyai kelebihan tersendiri, maka SAP memperbolehkan entitas pelaporan memilih salah satu metode yang dipandang dapat menyajikan unsur operasi secara layak pada entitas tersebut. Entitas pelaporan yang mengelompokkan beban menurut klasifikasi fungsi juga harus mengungkapkan tambahan informasi beban menurut klasifikasi ekonomi, antara lain meliputi beban penyusutan/*amortisasi*, beban gaji dan tunjangan pegawai, dan beban bunga pinjaman. Sama halnya dengan LRA, struktur Laporan Operasional Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki perbedaan. Perbedaan struktur tersebut juga diakibatkan karena perbedaan sumber pendapatan pada pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Namun, yang membedakan antara LRA dengan LO diantaranya adalah sebagai berikut:

- a) Pengelompokan pada LRA terdiri dari pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan, sedangkan pengelompokan pada LO terdiri dari pendapatan dan beban dari kegiatan operasional, *surplus/defisit* dari kegiatan non operasional dan pos-pos luar biasa.
- b) LRA menyajikan pendapatan dan belanja yang berbasis kas, sedangkan LO menyajikan pendapatan dan beban yang berbasis akrual.

- c) Akibat dari perbedaan basis akuntansi yang digunakan, Pada LRA, pembelian aset tetap dikategorikan sebagai belanja modal atau pengurang pendapatan, sedangkan pada LO, pembelian aset tetap tidak diakui sebagai pengurang pendapatan.

4. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos Ekuitas awal atau ekuitas tahun sebelumnya, *Surplus/defisit-LO* pada periode bersangkutan dan koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya:

- a) Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya;
- b) Perubahan nilai aset tetap karena *revaluasi* aset tetap.

Di samping itu, suatu entitas pelaporan juga perlu menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan Ekuitas yang dijelaskan pada Catatan atas Laporan Keuangan. Struktur Laporan Perubahan Ekuitas baik pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota tidak memiliki perbedaan.

5. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai *aset*, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal neraca tersebut dikeluarkan. *Aset*, kewajiban, dan ekuitas dana merupakan rekening utama laporan yang masih dapat dirinci lagi menjadi subrekening. Neraca mencantumkan pos- pos berikut:

A. Aset

Aset yaitu sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya

nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipilih. Aset diklasifikasikan menjadi dua kelompok, yaitu : asset lancar dan asset tidak lancar. Pengakuan Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah dan mempunyai nilai yang dapat diukur dengan andal. Aset diakui pada saat diterima atau kepemilikannya berpindah. Pengukuran Aset Pengukuran aset sebagai berikut:

- a. Kas dan piutang dicatat sebesar nilai nominal
- b. Investasi jangka pendek dicatat sebagai nilai perolehan
- c. Persediaan dicatat sebesar biaya perolehan, biaya standar, dan nilai wajar.

B. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Karakteristik esensial kewajiban adalah bahwa pemerintah mempunyai kewajiban masa kini yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang. Kewajiban diklasifikasikan menjadi dua kelompok, yaitu: Kewajiban Jangka Pendek (utang pemerintah daerah yang jatuh temponya kurang dari satu tahun) dan Kewajiban Jangka Panjang (utang pemerintah yang jatuh temponya lebih dari satu tahun/12 bulan setelah tanggal pelaporan). Pengakuan Kewajiban-Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sekarang. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

C. Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antar aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal pelaporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan perubahan Ekuitas. Ekuitas dana diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu:

- a) Ekuitas Dana Lancar, yaitu selisih antara asset lancar dengan kewajiban jangka pendek.
- b) Ekuitas Dana Investasi, yaitu cerminan dari kekayaan pemerintah daerah yang tertanam dalam investasi jangka panjang, asset tetap, dan asset lainnya yang dikurangi dengan kewajiban jangka panjang.

Ekuitas Dana Cadangan, yaitu cerminan dari kekayaan pemerintah daerah yang dicadangkan untuk tujuan tertentu.

6. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan *transitoris* yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintahpusat/daerah selama periode tertentu. Unsur yang dicakup dalam Laporan Arus Kas terdiri dari penerimaan dan pengeluaran kas, yang masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke Bendahara Umum Negara/Daerah.
2. Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari Bendahara Umum Negara/Daerah.

7. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

2.4. Ukuran pemerintahan daerah

Ukuran organisasi merupakan nilai yang menunjukkan besar kecilnya organisasi. Menurut Damanpour (dalam Suhardjanto,2011) ukuran organisasi adalah *prediktor signifikan* untuk kepatuhan akuntansi. *Size* dapat diukur dengan berbagai cara, antara lain jumlah karyawan, total aset, total pendapatan, dan tingkat produksi. Dalam konteks organisasi sektor publik, ukuran suatu organisasi dapat dilihat dari total aset dan total pendapatan. Meskipun total aset dianggap lebih stabil dibanding pendapatan, namun perputaran asset pada BUMN masih rendah (Prasidhanto,2012).

Pemerintah daerah yang merupakan bagian dari organisasi sektor publik dapat menggunakan total pendapatan sebagai proksi ukuran pemerintah daerah. Ukuran pemerintah daerah yang didasarkan pada total pendapatan dimana pemerintah daerah dengan total pendapatan yang lebih besar dapat memberikan kemudahan dalam memberi pelayanan masyarakat guna kemajuan daerah sebagai bukti peningkatan kinerja (Wardani, 2012).

Total pendapatan suatu daerah bersumber dari PAD, Dana Perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Penelitian Septian (2009) menggunakan ukuran (*size*) pemerintah daerah yang diproksikan dengan total pendapatan sebagai prediktor kelemahan pengendalian internal.Selain itu, tekanan politis yang dialami oleh birokrasi pemerintahan lokal yang besar cenderung lebih tinggi sehingga membuat para birokrat harus lebih transparan dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan.

Laswad, *et al* (Septian, 2009) menyatakan bahwa pemerintahan kabupaten/kota besar cenderung memiliki sumber daya yang lebih besar dari pada pemerintahan kabupaten/kota kecil yang memungkinkan mereka untuk menerapkan tertib administrasi dan pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, tekanan *politis* yang dialami oleh Total pendapatan suatu daerah bersumber dari PAD, Dana Perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

2.5. Kekayaan Pemerintahan Daerah

Kemakmuran adalah kemampuan dalam mencukupi kebutuhan. Kemakmuran suatu negara dapat diukur dengan berbagai macam ukuran yang tidak selalu sama karena setiap orang memiliki pandangan hidup yang berbeda sehingga tolak ukur dari kesejahteraan juga akan berbeda Abdullah (Sumarjo 2010) menyatakan bahwa kemakmuran (*wealth*) dari pemerintah daerah dapat dilihat dari PAD. PAD merupakan kekayaan riil dari masing-masing daerah. Membiayai kebutuhan daerah, pemerintah daerah terlebih dahulu menggunakan PAD agar memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah pusat.

Tingkat kemakmuran tentunya akan berdampak kepada peningkatan kualitas pelayanan publik sebagai bukti peningkatan kinerja pemerintah daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah disebutkan bahwa Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pemda dengan ukuran kemakmuran (*wealth*) atau kekayaan asli daerah (PAD) yang besar seharusnya memiliki nilai kinerja yang tinggi. Jika Pemda dengan ukuran dan PAD yang besar ternyata memiliki nilai yang rendah maka Pemda tersebut harus sadar dan mawas diri bahwa kinerjanya berarti lebih tidak baik dibanding Pemda dengan ukuran dan PAD yang memang lebih kecil. Pemda dengan ukuran dan PAD yang besar dituntut untuk lebih baik dalam mengelola dan memanfaatkan aset serta kekayaan yang dimilikinya demi pelayanan kepada masyarakat.

2.6. Tipe Pemerintahan Daerah

Daerah yang populasinya banyak dan memiliki beragam latar belakang sosial, maka permasalahan pemerintah daerahnya semakin kompleks. Permasalahan yang dihadapi pemerintah kota cenderung lebih kompleks dibandingkan kabupaten. Hal ini dikarenakan dari jumlah masyarakat yang memiliki keberagaman latar belakang sosial dan pendidikan. Kepala daerah memiliki dorongan yang lebih

besar untuk secara sukarela memberikan informasi guna pemantauan secara proporsional dengan wilayah *metropolitan* yang memiliki populasi penduduk yang besar dibanding dengan wilayah pedesaan yang memiliki jumlah penduduk *relatif* lebih sedikit. Wilayah *metropolitan* merupakan daerah tujuan urbanisasi yang memiliki penduduk lebih *heterogen*, baik dari sisi pendidikan, sosial dan ekonomi. Pemerintah daerah harus memberikan perhatian yang lebih dalam melayani kebutuhan warganya. Semakin *kompleks* permasalahan di suatu daerah, maka semakin besar pula tanggung jawab pemerintah daerah untuk dapat memberikan pelayanan yang maksimal bagi warganya.

Pemerintah daerah perlu membangun suatu sistem yang *terintegrasi* karena pemerintah daerah mengemban tanggung jawab yang besar. Untuk itu diperlukan adanya transparansi dalam setiap tindakan pemerintah daerah, termasuk transparansi dalam mengelola keuangan daerah. Internet merupakan media yang paling efisien dalam memberikan pelayanan penduduk di suatu daerah. Karena internet dapat menjangkau populasi penduduk yang lebih besar dalam memberikan pelayanan bagi pemerintah daerah. Laswad dkk (2005), menyatakan bahwa tipe pemerintahan yang berbentuk kota yang penduduknya lebih besar dan beragam, situs pemerintah daerahnya lebih canggih dan lebih banyak informasi yang diungkap pada situsnya.

2.7. Belanja daerah

Pendapatan daerah yang diperoleh baik dari pendapatan asli daerah maupun dana perimbangan tentunya digunakan oleh pemerintah daerah untuk membiayai belanja daerah. Menurut UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah, belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Berdasarkan struktur anggaran daerah, elemen-elemen yang termasuk dalam belanja daerah terdiri dari :

1. Belanja aparatur daerah
2. Belanja pelayanan publik
3. Belanja bagi hasil dan bantuan keuangan

4. Belanja tidak tersangka.

Belanja daerah dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib dan pilihan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Belanja daerah berdasarkan pada Permendagri No.13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan daerah dikelompokkan ke dalam belanja langsung dan belanja tidak langsung.

Belanja Langsung

Kelompok belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yaitu belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal.

Belanja Tidak Langsung

Kelompok belanja tidak langsung, merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yaitu belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga.

Fenomena yang muncul dalam era otonomi, bahwa transfer pemerintah khususnya DAU begitu dominan dalam membiayai belanja daerah, dan kurang berdampak pada PAD daerah diindikasikan sebagai ilusi fiskal (*fiscal illusion*). Menurut Priyo (2009), belanja daerah pada dasarnya merupakan fungsi dari penerimaan daerah. Belanja merupakan variabel terikat yang besarnya akan sangat bergantung pada sumber- sumber pembiayaan daerah, baik yang berasal dari penerimaan sendiri maupun dari transfer pemerintah pusat. Sehingga dalam pengukurannya jika terdapat hubungan negatif antara variabel- variabel pendapatan dengan variabel belanja, maka terdapat ilusi fiskal.

2.8. Opini Audit

Opini audit merupakan suatu laporan yang diberikan oleh auditor terdaftar yang menyatakan bahwa pemeriksaan telah dilakukan sesuai dengan norma atau aturan pemeriksanaan akuntan disertai dengan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan yang diperiksa (Tobing, 2004).

Opini audit diberikan oleh auditor melalui beberapa tahap audit sehingga auditor dapat memberikan kesimpulan atas opini yang harus diberikan atas laporan keuangan yang diauditnya. Opini yang diberikan atas asersi manajemen dari klien atau instansi perusahaan yang diaudit dikelompokkan menjadi wajar tanpa pengecualian, wajar dengan pengecualian, tidak membeikan pendapat, dan tidak wajar. Menurut Standar Profesional Akuntan (PSA 29), opini audit terdiri dari lima jenis yaitu:

A. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (*Unqualified Opinion*)

Pendapat yang diberikan ketika audit telah dilaksanakan sesuai dengan Standar Auditing (SPAP), auditor tidak menemukan kesalahan material secara keseluruhan laporan keuangan atau tidak terdapat penyimpangan dari prinsip akuntansi yang berlaku (SAK). Bentuk laporan ini digunakan apabila terdapat keadaan berikut:

1. Bukti audit yang dibutuhkan telah terkumpul secara mencukupi dan auditor telah menjalankan tugasnya sedemikian rupa, sehingga ia dapat memastikan kerja lapangan telah ditaati
2. Ketiga standar umum telah diikuti sepenuhnya dalam perikatan kerja.
3. Laporan keuangan yang di audit disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia yang ditetapkan pula secara konsisten pada laporan-laporan sebelumnya. serta penjelasan yang mencukupi telah disertakan pada catatan kaki dan bagian-bagian lain dari laporan keuangan.

Tidak terdapat ketidak pastian yang cukup berarti (*no material uncertainties*) mengenai perkembangan di masa mendatang yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya atau dipecahkan secara memuaskan.

B. Opini Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf Penjelasan (*Modified Unqualified Opinion*)

Adalah pendapat yang diberikan ketika suatu keadaan tertentu yang tidak berpengaruh langsung terhadap pendapat wajar. Keadaan tertentu dapat terjadi apabila:

- a. Pendapat auditor sebagian didasarkan atas pendapat auditor independen lain.'
- b. Karena belum adanya aturan yang jelas maka laporan keuangan dibuat menyimpang dari SAK
- c. Laporan dipengaruhi oleh ketidak pastian peristiwa masa yang akan datang hasilnya belum dapat diperkirakan pada tanggal laporan audit.
- d. Terdapat keraguan yang besar terhadap kemampuan satuan usaha dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya.
- e. Diantara dua periode akuntansi terdapat perubahan yang material dalam penerapan prinsip akuntansi.

Data keuangan tertentu yang diharuskan ada oleh BAPEPAM namun tidak disajikan.

C. Opini Wajar Dengan Pengecualian (*Qualified Opinion*)

Adalah pendapat yang diberikan ketika laporan keuangan dikatakan wajar dalam hal yang material, tetapi terdapat sesuatu penyimpangan/ kurang lengkap pada pos tertentu, sehingga harus dikecualikan. Dari pengecualian tersebut yang dapat mungkin terjadi apabila:

1. Bukti kurang cukup
2. Adanya pembatasan ruang lingkup
3. Terdapat penyimpangan dalam penerapan prinsip akuntansi yang berlaku umum (SAK).

Menurut SA 508 paragraf 20 (IAI, 2002), jenis pendapat ini diberikan apabila:

1. Tidak adanya bukti *kompeten* yang cukup atau adanya pembatasan lingkup audit yang material tetapi tidak mempengaruhi laporan keuangan secara

keseluruhan.

2. Auditor yakin bahwa laporan keuangan berisi penyimpangan dari prinsip akuntansi yang berlaku umum yang berdampak material tetapi tidak mempengaruhi laporan keuangan secara keseluruhan. Penyimpangan tersebut dapat berupa pengungkapan yang tidak memadai, maupun perubahan dalam prinsip akuntansi.

D. Opini Tidak Wajar (*Adverse Opinion*)

Adalah pendapat yang diberikan ketika laporan secara keseluruhan ini dapat terjadi apabila auditor harus memberi tambahan paragraf untuk menjelaskan ketidak wajaran atas laporan keuangan, disertai dengan dampak dari akibat ketidak wajaran tersebut, pada laporan auditnya.

E. Opini Tidak Memberikan Pendapat (*Disclaimer of opinion*)

Adalah pendapat yang diberikan ketika ruang lingkup pemeriksaan yang dibatasi, sehingga auditor tidak melaksanakan pemeriksaan sesuai dengan standar auditing yang ditetapkan IAI. Pembuatan laporannya auditor harus memberi penjelasan tentang pembatasan ruang lingkup oleh *klien* yang mengakibatkan auditor tidak memberi pendapat.

2.9. Penelitian Terdahulu

Penelitian terkait dengan ukuran pemerintahan daerah yang didasarkan pada total pendapatan dimana pemerintah daerah dengan total pendapatan yang lebih besar dapat memberikan kemudahan dalam memberi pelayanan masyarakat guna kemajuan daerah sebagai bukti peningkatan kinerja (Wardani, 2012). Penelitian Septian (2009) menggunakan ukuran (*size*) pemerintah daerah yang di proksikan dengan total pendapatan sebagai prediktor kelemahan pengendalian internal. Selain itu, tekanan politis yang dialami oleh birokrasi pemerintahan lokal yang besar cenderung lebih tinggi sehingga membuat para birokrat harus lebih transparan dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan. Hal penelitiannya ditampilkan dalam tabel berikut ini :

Penelitian Terdahulu

Penelitian/Tahun	Judul penelitian	Variable yang digunakan	Hasil penelitian
Nazura Meutia	Pengaruh ukuran pemerintah daerah,kekayaan pemerintah daerah, tipe pemerintah daerah,dan opini audit terhadap ketersediaan LKPD di situs pemerintah daerah (studi kabupaten/kota di sumatera 2015)	Independent: ukuran pemerintah daerah,kekayaan pemerintah daerah, tipe pemerintah daerah, dan opini audit Dependen : ketersediaan LKPD di situs pemerintah daerah	ukuran pemerintah daerah,kekayaan pemerintah daerah, tipe pemerintah daerah,dan opini audit berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap ketersediaan LKPD di situs pemerintah daerah
Kadek Aris Dwi Pratama / 2015	Pengaruh Kompleksitas Pemerintah Daerah,Ukuran Pemerintah Daerah,Kekayaan Pemerintah Daerah,dan Belanja Daerah Terhadap Pelaporan Keuangan Pemerintahan Daerah (Studi pada Pemerintah Kabupaten/Kota di	Independen: Kompleksitas Pemerintah Daerah,Ukuran Pemerintahan Daerah,Belanja Daerah Dependen: Pelaporan Keuangan Pemerintahan Daerah	Variabel kompleksitas Pemerintah Daerah,Ukuran Pemerintah Daerah,Kekayaan Daerahdan Belanja daerah berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pelaporan keuangan

	Bali Tahun 2010-2013)		pemerintah daerah.
Christina/2013	Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Rasio Kemandirian Daerah, Rasio Pembiayaan Hutang, Belanja Daerah, Dan Tipe Pemerintahan Daerah Terhadap Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Independen: Ukuran Pemerintah Daerah, Rasio Kemandirian Daerah, Rasio Pembiayaan Daerah, Tipe Pemerintahan Pemerintah Daerah Dependen: Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Ukuran Pemerintah Daerah, Rasio Kemandirian Daerah, Rasio Pembiayaan Hutang, Belanja Daerah dan Tipe Pemerintahan Daerah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. Secara parsial,
Harahap, Louise Zalma/2019	Pengaruh Tipe Pemerintah Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, dan Jumlah Penduduk Terhadap Transparansi Informasi Keuangan Pemerintah	Independen: tipe pemerintah daerah, ukuran pemerintah daerah, dan jumlah penduduk Dependen: Transparansi Informasi	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial Tipe Pemerintah Daerah berpengaruh negatif sedangkan Ukuran Pemerintah Daerah dan

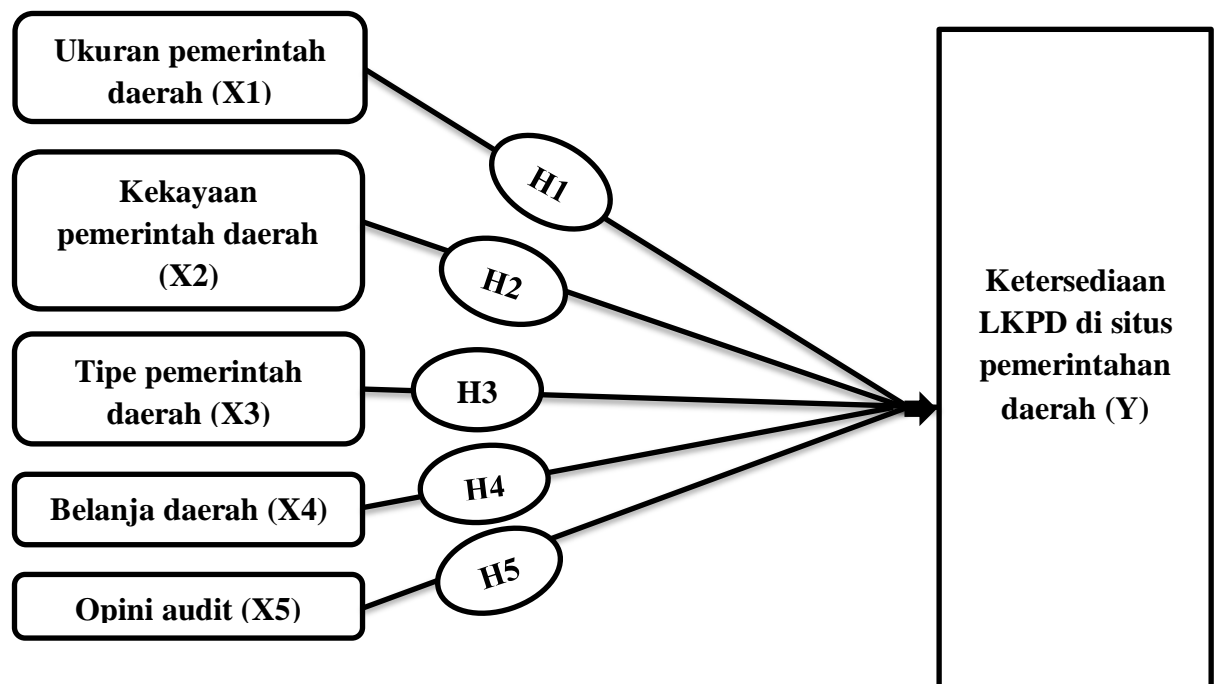
	Kabupaten dan Kota di Indonesia	Keuangan pemerintah daerah.	Jumlah Penduduk tidak berpengaruh secara parsial terhadap Transparansi Informasi Keuangan Pemerintah Kabupaten dan Kota di Indonesia. Secara simultan, Tipe Pemerintah Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, dan Jumlah Penduduk berpengaruh terhadap Transparansi Informasi Keuangan Pemerintah Kabupaten dan Kota di Indonesia..
Shafira Ramadhiautami, Sulardi/ 2019	Pengaruh karakteristik pemerintah daerah, opini audit dan rasio kemandirian terhadap pengungkapan laporan keuangan	Independen: Karakteristik pemerintah daerah, opini audit, dan rasio kemandirian	variabel populasi dan IPM berpengaruh positif pada pengungkapan laporan keuangan pemda, sedangkan

	pemerintah daerah	Dependen: Laporan keuangan pemerintah daerah	variabel opini audit dan rasio kemandirian daerah tidak memengaruhi pengungkapan laporan keuangan pemda.
Sulis Setyorini/ 2020	Pengaruh ukuran pemerintah, kemandirian pemerintah,kekayaan pemerintah daerah dan intergovermental revenue terhadap Tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2015-2017	Independen: Ukuran pemerintah daerah ,kemandirian pemerintah daerah, kekayaan pemerintah daerah dan intergovern mental revenue Dependen : Pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah	kemandirian pemerintah daerah dan intergovernmental revenue berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah, sedangkan ukuran pemerintah daerah dan kekayaan pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap laporan keuangan daerah

2.1 Tabel penelitian terdahulu

2.10. Kerangka Konseptual dan Pengembangan Hipotesis

Diasumsikan bahwa karakteristik pemerintah daerah dan sosial ekonomi masing-masing daerah diperkirakan memiliki pengaruh terhadap ketersediaan informasi keuangan daerah pada situs-situs resmi pemerintahan daerah. Maka ketersediaan LKPD pada situs pemerintahan daerah diharapkan dapat membantu masyarakat untuk mengetahui informasi yang berkaitan dengan laporan keuangan yang ada. Oleh sebab itu dilakukan penelitian untuk mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap ketersediaan LKPD pada situs pemerintahan daerah. Adapun faktor-faktor yang akan diteliti adalah ukuran pemerintahan daerah, kekayaan pemerintahan daerah, tipe pemerintahan daerah, belanja daerah dan opini audit. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat digambarkan sebuah kerangka pemikiran mengenai ukuran pemerintahan daerah, kekayaan pemerintahan daerah, tipe pemerintahan daerah, belanja daerah dan opini audit terhadap ketersediaan LKPD sebagai berikut:



2.10 Gambar kerangka koseptual

2.10.1 Pengaruh Ukuran Pemerintahan Daerah terhadap Ketersediaan LKPD

Pemerintah daerah yang berukuran besar memiliki jumlah dan transfer kekayaan yang besar pula, sehingga pemerintah daerah akan mendapatkan pengawasan yang lebih besar dari berbagai pihak yang salah satunya adalah masyarakat. Pemerintah daerah yang memiliki ukuran atau memiliki aset yang lebih besar akan memiliki tekanan yang besar pula dari publik untuk menyajikan laporan keuangannya sebagai upaya meningkatkan transparansi. Pemerintah Daerah Kota dengan ukuran pemerintahan yang lebih tinggi akan memiliki tingkat pemantauan politik dan informasi yang lebih tinggi atas gambaran kinerja pemerintah daerah dibandingkan dengan Pemerintah Daerah Kabupaten. Dengan semakin maraknya perkembangan internet di masyarakat, maka salah satu cara yang dapat dilakukan untuk melakukan transparansi informasi keuangan daerah adalah dengan menggunakan situs resmi pemerintahan daerah di internet

H1 : Ukuran Pemerintahan Daerah berpengaruh terhadap Ketersediaan LKPD.

2.10.2 Pengaruh Kekayaan Pemerintahan Daerah terhadap Ketersediaan LKPD

Styles dan Tennyson (2007) berpendapat bahwa besarnya kekayaan daerah juga berbanding lurus dengan kepedulian masyarakat tentang kinerja pemerintahan daerah kota dengan tingkat kekayaan yang lebih tinggi akan memiliki tingkat pemantauan politik dan informasi yang lebih tinggi atas gambaran kinerja pemerintahan daerah. Kekayaan yang besar biasanya rentan terhadap penyimpangan. Hal inilah yang mendorong masyarakat selaku *principal*, menjadi lebih tertarik dalam mengawasi kinerja pemerintah daerah dan menuntut transparansi atas pengelolaan keuangan pemerintah daerah.

Pemerintah daerah dengan kekayaan yang besar menanggung biaya pengawasan yang lebih tinggi dalam memenuhi tuntutan transparansi dari masyarakat. Melalui publikasi laporan keuangan, pemerintah daerah dapat menyampaikan informasi keuangan secara lebih lengkap dengan biaya yang lebih murah, sehingga dapat mengurangi asimetri informasi yang terjadi antara pemerintah daerah dan masyarakat.

H2 : Kekayaan Pemerintahan Daerah berpengaruh terhadap Ketersediaan LKPD.

2.10.3 Pengaruh Tipe Pemerintahan Daerah terhadap Ketersediaan LKPD

Daerah otonom di Indonesia dibedakan menjadi Daerah otonom tingkat I, yaitu Pemerintah Provinsi, dan Daerah otonom tingkat II, yaitu Kabupaten dan Kota. Kabupaten dan Kota memiliki perbedaan secara geografis dan demografis. Perbedaan karakteristik Kabupaten dan Kota diprediksi akan memberikan tingkat pengungkapan yang berbeda pada website Pemerintah Daerah. Daerah kota memiliki tingkat sosial, ekonomi, dan pendidikan lebih tinggi dibandingkan dengan daerah kabupaten. Terkait dengan penggunaan internet, penduduk kota cenderung menggunakan dan mengakses dalam jumlah yang lebih besar, sehingga Pemerintah Daerah berbentuk Kota akan mengungkapkan informasi yang lebih besar pada website daripada Pemda berbentuk Kabupaten.:

H3 : Tipe Pemerintahan Daerah berpengaruh terhadap Ketersediaan LKPD.

2.10.4 Pengaruh Belanja Daerah terhadap Ketersediaan LKPD

Belanja daerah dipergunakan dalam mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan provinsi, kota dan kabupaten yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan penanganannya dalam bagian ataupun bidang-bidang tertentu antara pemerintah daerah yang ditetapkan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Belanja daerah diperuntukan melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat (principal) dalam upaya memenuhi kewajiban daerah (Agent) yang mewujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial (pasal 31 Permendagri No.13/2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah). Semakin besar belanja mengindikasikan bahwa suatu daerah dapat melaksanakan kewajibannya dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat. Belanja daerah menentukan pelaporan keuangan daerah, belanja daerah digunakan untuk untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.

H4: Tingkat Belanja Daerah berpengaruh terhadap Ketersediaan LKPD.

2.10.5 Pengaruh Opini Audit terhadap Ketersediaan LKPD

Perkembangan opini audit dalam pemerintahan Kota/Kabupaten juga termasuk baik karena terjadi peningkatan dari tahun ke tahun. Menurut Hartati (2011) salah satu kriteria pemeriksaan atas laporan keuangan, yang dilakukan dalam rangka memberikan pendapat/opini atas kewajaran informasi keuangan, yang disajikan dalam laporan keuangan salah satunya berdasarkan pada pengungkapan yang lengkap (*full disclosure*). Oleh karena itu pengungkapan (*disclosure*) merupakan hal yang sangat penting dalam pemeriksaan untuk mengeluarkan opini atas laporan keuangan. Sehingga penilaian opini dapat dilihat dari pengungkapan laporan keuangan tersebut..

H5 : Opini Audit berpengaruh terhadap Ketersediaan LKPD

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Sumber Data

Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder, yang berupa LKPD TA 2018 dan DJPK KEMENKEU seluruh Provinsi Se-sumatera yang telah diperiksa BPK RI dan hasil pemeriksaannya telah disampaikan ke lembaga perwakilan rakyat. Sehingga menjadi dokumen publik yang secara umum dapat diakses oleh semua pihak (publik/masyarakat luas).

3.2 Metode Pengumpulan Data

Penulisan penelitian ini menggunakan metode dokumentasi. metode yang digunakan adalah dokumentasi mekanis, yakni dengan bantuan mesin untuk menyediakan data dengan catatan peristiwa tanpa kehadiran peneliti secara fisik pada objek penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan kunjungan pada portal LKPD TA 2018, DJPK KEMENKEU dan BPK RI. Data yang dikumpulkan secara mekanis tersebut bebas bias (Sekaran, 2006). Dalam hal ini peneliti tidak menggunakan penyebaran kuesioner karena penelitian ini mencakup seluruh kabupaten/kota yang ada di Lampung. Jadi saya hanya mengambil data yang sudah ada dan benar-benar sudah di sahkan oleh BPK RI dan DJPK KEMENKEU.

3.3 Populasi dan Sampel

3.3.1 Populasi

Populasi adalah sekelompok objek yang menjadi sasaran penelitian berupa manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, udara, gejala, nilai, peristiwa, sikap hidup dan sebagainya, sehingga objek-objek ini dapat menjadi sumber data penelitian (Bungin, 2013:101). Jadi, populasi dari penelitian ini adalah seluruh kabupaten dan kota Se-Sumatera yang berjumlah 10 Provinsi dan 154 kabupaten dan kota.

3.3.2 Sampel

Sampel adalah bagian dari elemen-elemen yang dimiliki populasi (Bungin, 2013). Teknik pemilihan sampel dilakukan dengan metode *purposive sampling* atau teknik pengambilan sampel dengan maksud kriteria tertentu. Pengambilan sampel dengan maksud atau pertimbangan tertentu ini sebelumnya peneliti telah menetapkan kriteria sample yang diharapkan, apabila kriteria sampel tidak terpenuhi maka tidak dapat dijadikan sebagai sampel (Sudarmanto, 2013). Sampel dari penelitian ini adalah seluruh kabupaten dan kota yang berjumlah 154 kabupaten dan kota Se-sumatera.

Kriteria Sampel

1. Pemerintah daerah kabupaten/kota Se-Sumatera yang memiliki situs resmi pemerintah daerah
2. Pemerintah daerah kabupaten/kota Se-Sumatera yang telah mempublikasikan laporan keuangan daerah tahun 2018 (LKPD)
3. Pemerintah daerah yang LKPD nya menyediakan data yang diperlukan oleh peneliti

3.4 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel

3.4.1 Variabel Penelitian

Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang menjadi pusat suatu penelitian untuk ditarik kesimpulannya. Dalam penelitian ini terdapat lima jenis variabel, yaitu variabel independen (bebas) dan variabel dependen (terikat). Variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel Independen (bebas). Sedangkan variabel independen merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel Dependen (terikat). Penelitian ini ingin menguji pengaruh variabel independen, yaitu ukuran pemerintahan daerah (X1), kekayaan pemerintahan daerah (X2), tipe pemerintahan daerah (X3), belanja daerah (X4) dan opini audit (X5) terhadap ketersediaan LKPD (Y).

3.4.2 Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel adalah cara menemukan dan mengukur variabel-variabel dengan merumuskan secara singkat dan jelas, serta tidak menimbulkan berbagai macam tafsiran (Rr. Putri, 2013).

Ukuran Pemerintah Daerah (X1)

Ukuran pemerintah daerah yang didasarkan pada total pendapatan dimana pemerintah daerah dengan total pendapatan yang lebih besar dapat memberikan kemudahan dalam memberi pelayanan masyarakat guna kemajuan daerah sebagai bukti peningkatan kinerja (wardani, 2012). Total pendapatan suatu daerah bersumber dari PAD, Dana Perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Penelitian Septian (2009) menggunakan ukuran (*size*) pemerintah daerah yang diproksikan dengan total pendapatan sebagai sebagai prediktor kelemahan pengendalian internal. Laswad, *et al* (dalam Septian, 2009) menyatakan bahwa pemerintahan kabupaten/kota besar cenderung memiliki sumber daya yang lebih besar daripada pemerintahan kabupaten/kota kecil yang memungkinkan mereka untuk menerapkan tertib administrasi dan pengelolaan keuangan daerah.

$$\text{Ukuran Pemerintah Daerah} = \text{Total aset}$$

Kekayaan Pemerintahan Daerah (X2)

Kekayaan Pemerintah daerah mencakup semua barang serta kekayaan alam, baik bergerak/tidak bergerak ataupun berwujud/tidak berwujud yang dimiliki atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah, dan BUMD yang terbatas pada nilai jumlah penyertaan modal negara. Sedangkan dalam arti yang lebih sempit, kekayaan daerah dapat dipersepsikan sebagai segala sesuatu yang dapat dinilai dengan uang yang dimiliki oleh negara baik di tingkat pusat maupun daerah dan BUMN/BUMD. Pemda dengan ukuran kemakmuran (*wealth*) atau kekayaan asli daerah (PAD) yang besar seharusnya memiliki nilai kinerja yang tinggi. Jika Pemda dengan ukuran dan PAD yang besar ternyata memiliki nilai yang rendah maka Pemda tersebut harus sadar dan mawas diri bahwa kinerjanya berarti lebih tidak baik dibanding Pemda dengan ukuran dan PAD yang memang lebih kecil.

Pemda dengan ukuran dan PAD yang besar dituntut untuk lebih baik dalam mengelola dan memanfaatkan aset serta kekayaan yang dimilikinya demi pelayanan kepada masyarakat.

Kekayaan Daerah = Jumlah Pendapatan Asli Daerah

Tipe Pemerintahan Daerah (X3)

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintahan Daerah di Indonesia terdiri dari Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri atas kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dibantu oleh Perangkat Daerah Laswad dkk (2005), menyatakan bahwa tipe pemerintahan yang berbentuk kota yang penduduknya lebih besar dan beragam, situs pemerintah daerahnya lebih canggih dan lebih banyak informasi yang diungkap pada situsnya. Proksi tipe pemerintahan daerah yang digunakan dalam penelitian inimerupakan variable *dummy* yang dimana 1 diberikan jika pemerintah daerah berbentuk kota dan 0 diberikan jika pemerintah daerah berbentuk kabupaten.

Belanja daerah (X4)

Belanja daerah pada dasarnya merupakan fungsi dari penerimaan daerah. Belanja merupakan variabel terikat yang besarnya akan sangat bergantung pada sumber-sumber pembiayaan daerah, baik yang berasal dari penerimaan sendiri maupun dari transfer pemerintah pusat.. Semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi saldo Anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah, PSAP No.2 Paragraf 7

Belanja Daerah = Total Realisasi Belanja

Opini Audit (X5)

Opini audit adalah pendapat yang diberikan ketika laporan keuangan dikatakan wajar dalam hal yang material, tetapi terdapat sesuatu penyimpangan/ kurang lengkap pada pos tertentu, sehingga harus dikecualikan. Opini yang diberikan atas asersi manajemen dari klien atau instansi pemerintah yang diaudit dikelompokkan menjadi wajar tanpa pengecualian, wajar dengan pengecualian, tidak memberikan pendapat, dan tidak wajar. Adapun kelas interval dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Nilai 5 diberikan jika opini audit terhadap (LKPD) adalah WTP (Wajar tanpa pengecualian)
- b) Nilai 4 diberikan jika opini audit terhadap (LKPD) adalah WTP DPP (Wajar tanpa pengecualian dengan paragraph penjelasan)
- c) Nilai 3 diberikan jika opini audit terhadap (LKPD) adalah WDP (Wajar dengan pengecualian)
- d) Nilai 2 diberikan jika opini audit terhadap (LKPD) adalah TW (tidak wajar)
- e) Nilai 1 diberikan jika opini audit terhadap (LKPD) adalah TMP (Tidak memberikan pendapat)

Ketersediaan LKPD di situs pemerintahan daerah (Y)

Transparansi informasi Keuangan pemerintah kabupaten dan kota di Indonesia adalah pemberian informasi keuangan berupa laporan keuangan melalui media internet pada website resmi yang dilakukan oleh pemerintahan kabupaten dan kota yang telah diwajibkan dalam suatu peraturan. Laporan Keuangan Daerah merupakan informasi yang memuat data berbagai elemen struktur kekayaan dan struktur finansial yang merupakan pencerminan hasil aktivitas tertentu. Terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih,

Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Kelas interval yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Nilai 0 diberikan jika tidak mempublikasikan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) pemerintah daerah.
2. Nilai 1 diberikan jika mempublikasikan 1-2 laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) pemerintah daerah.

Definisi operasional

No	Variable	Definisi	Indicator
1	Ketersediaan Laporan Keuangan Daerah (Y)	Transparansi informasi Keuangan pemerintah kabupaten dan kota diIndonesia adalah pemberian informasi keuangan berupa laporan keuangan melalui media internet pada website resmi yang dilakukan oleh pemerintahan kabupaten dan kota yang telah diwajibkan dalam suatu peraturan.	Nilai 0 diberikan jika tidak mempublikasikan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) pemerintah daerah. Nilai 1 diberikan jika mempublikasikan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) pemerintah daerah.
2	Ukuran pemerintah daerah (X1)	Ukuran Pemerintah Daerah menggambarkan pemerintah daerah yang memiliki ukuran atau memiliki aset yang lebih besar maka memiliki tekanan yang besar pula dari publik untuk menyajikan laporan keuangannya sebagai	Ukuran pemerintah daerah diukur dari total aset yang dimiliki oleh daerah tersebut.

		upaya meningkatkan transparansi.	
3	Kekayaan Pemerintah daerah (X2)	Kekayaan Pemerintah daerah mencakup semua barang serta kekayaan alam, baik bergerak/tidak bergerak ataupun berwujud/tidak berwujud yang dimiliki atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan BUMD yang terbatas pada nilai jumlah penyertaan modal negara.	Kekayaan Daerah diukur dari Jumlah Pendapatan Asli Daerah
4	Tipe Pemerintah Daerah (X3)	Tipe Pemerintah Daerah didefinisikan sebagai bentuk pemerintah daerah. Pemerintah daerah di Indonesia ada yang berbentuk pemerintah kota dan ada pula yang berbentuk pemerintah kabupaten.	Pengukuran variabel tipe pemerintah daerah dalam penelitian ini dengan cara memberi nilai 1 untuk pemerintah kota dan nilai 0 untuk pemerintah kabupaten
5	Belanja daerah (X4)	Belanja daerah pada dasarnya merupakan fungsi dari penerimaan daerah. Belanja merupakan variabel terikat yang besarnya akan sangat bergantung pada sumber- sumber pembiayaan daerah, baik yang berasal dari penerimaan sendiri maupun dari transfer pemerintah pusat..	Belanja Daerah diukur dari total Realisasi Belanja

6	Opini audit (X5)	Opini audit adalah pendapat yang diberikan ketika laporan keuangan dikatakan wajar dalam hal yang material, tetapi terdapat sesuatu penyimpangan/ kurang lengkap pada pos tertentu, sehingga harus dikecualikan	<p>Nilai 5 diberikan jika opini audit terhadap (LKPD) adalah WTP (Wajar tanpa pengecualian)</p> <p>Nilai 4 diberikan jika opini audit terhadap (LKPD) adalah WTP DPP (Wajar tanpa pengecualian dengan paragraph penjelasan)</p> <p>Nilai 3 diberikan jika opini audit terhadap (LKPD) adalah WDP (Wajar dengan pengecualian)</p> <p>Nilai 2 diberikan jika opini audit terhadap (LKPD) adalah TW (tidak wajar)</p> <p>Nialai 1 diberikan jika opini audit terhadap (LKPD) adalah TMP (Tidak memberikan pendapat)</p>
---	------------------	---	--

3.1 Tabel definisi operasional

3.5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah metode analisis statistik deskriptif, -2 loglikelihood, Nagelkerke R Square, Hosmer dan lemeshow test. Pengolahan data penelitian ini menggunakan program komputer statistik SPSS20.

3.5.1 Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif merupakan teknik analisis data dengan cara mengorganisasikan, meringkas, dan menyajikan data menjadi bentuk yang lebih

informatif (Lind, Marchal, and Wathen, 2010). Deskriptif data ini menunjukkan keseragaman data-data yang digunakan dalam penelitian. Analisis statistik deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini adalah rata-rata (mean), maksimum, minimum, dan standar deviasi.

3.5.2 Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan dengan analisis multivariat dengan menggunakan regresi logistik (*logistic regression*). Regresi logistik adalah regresi yang variabel bebasnya merupakan kombinasi antara metrik dan non metrik (nominal) (Ghozali, 2006). Regresi logistik tidak memerlukan uji normalitas dan uji asumsi klasik pada variabel bebasnya. Gujarati (2006) menyatakan bahwa regresi logistik mengabaikan heterokedastisitas, artinya variabel terikat tidak memerlukan homoskedastisitas untuk masing-masing variabel bebasnya.

Model regresi logistik yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$P = \frac{1}{1 + e^{-b_0 + b_1x_1 + b_2x_2 + b_3x_3 + b_4x_4 + b_5x_5}}$$

Keterangan:

- P = Probabilitas Ketersediaan LKPD pemerintah
- e = Logaritma Natural
- x1 = Ukuran Pemerintah Daerah
- x2 = Kekayaan Pemerintah Daerah
- x3 = Tipe Pemerintah Daerah
- x4 = Belanja Daerah
- x5 = Opini Audit BPK
- b0 = Konstanta Regresi
- b1–b5 = Koefisien Regresi

3.5.3 Uji Kelayakan Model

Chi-square goodness-of-fit test menghasilkan model yang menunjukkan variabel independen yang secara paling baik memprediksi variabel dependennya. *chi-square goodness-of-fit test* menunjukkan sejauh mana variabel independen dalam model dengan benar mengklasifikasikan pengamatan dalam sampel. Untuk menganalisis *chi-square goodness-of-fit test*, nilai aktual dari observasi dibandingkan dengan nilai prediksi pada variabel dependen. Perbandingan nilai aktual dan prediksi bisa dicapai dengan menggunakan beberapa pengukuran untuk mengukur kelayakan regresi, yaitu: (1) dengan melihat *-2 Log Likelihood* (2) koefisien determinasi (*Cox & Snell R Square* dan *Nagelkerke R Square*) (3) menilai *chi-square* untuk keseluruhan model (*Hosmer and Lemeshow Test*).

3.5.4 Uji -2 log likelihood

Uji regresi logistik yang kedua menggunakan uji *-2 log likelihood*. Uji ini digunakan untuk menilai model regresi logistik layak dipakai atau tidak. Tampilan output *SPSS* memberikan dua nilai *-2 log likelihood* yaitu model yang hanya memasukkan konstanta dan model dengan konstanta serta variabel bebas ke dalam model regresi logistik. Dalam *software SPSS* untuk menguji *overall model fit* dapat dilihat dari nilai *-2 log likelihood*. *SPSS* memberikan 2 (dua) nilai *-2 log likelihood* yaitu nilai *-2 log likelihood* awal pada saat *block = 0* dan nilai *-2 log likelihood* akhir pada saat *block = 1*. Jika terjadi penurunan nilai *-2 log likelihood* pada saat *block = 0* ke *block = 1* maka, secara keseluruhan model fit dengan data (Ghozali, 2006).

3.5.5 Uji Nagelkerke R Square

Pengujian dengan *Nagelkerke R Square* Uji ini dilakukan untuk menilai seberapa besar variasi dari variabel terikat dapat dijelaskan oleh variabel bebas. Menurut

Ghozali (2006), dalam model logistik koefisien determinasi (R^2) yang digunakan berbeda dengan *multiple regression*. Koefisien determinasi yang digunakan dalam model logistik adalah *Nagelkerke R Square*. *Nagelkerke's R square* merupakan modifikasi dari koefisien *Cox dan Snell* untuk memastikan bahwa nilainya bervariasi dari 0 (nol) sampai 1 (satu) (Ghozali, 2006). *Nagelkerke's R square* ini digunakan untuk mengukur seberapa besar variabilitas variabel independen yang digunakan dalam model mampu menjelaskan variabilitas variabel dependennya.

3.5.6 Uji Hosmer and Lemeshow

Berdasarkan Ghozali (2006) Untuk menguji kelayakan model regresi pada model logit digunakan *Hosmer dan Lemeshow test*. *Hosmer dan Lemeshow test* digunakan untuk menguji apakah data empiris telah sesuai dengan model penelitian. Hipotesa yang digunakan dalam pengujian ini adalah: H_0 : Model telah mampu menjelaskan data empiris (*Model fit*). H_a : Model tidak mampu menjelaskan data empiris. Dasar keputusan adalah dengan memperhatikan nilai *Goodness of Fit test* yang diukur dengan nilai *Chi-Square* pada bagian bawah *Hosmer dan Lemeshow test*.

Jika probabilitas > 0.05 maka H_0 diterima

Jika probabilitas < 0.05 maka H_0 ditolak

Jika H_0 ditolak berarti terdapat perbedaan signifikan antara model dengan nilai observasinya sehingga model tidak dapat memprediksi nilai observasinya. Namun, jika H_0 diterima maka model penelitian mampu memprediksi nilai observasinya atau dengan kata lain model dapat diterima karena sesuai dengan data observasinya.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Statistik Deskriptif

Dalam penelitian ini data yang dianalisis adalah seluruh data di kabupaten dan kota yang ada

Jumlah kabupaten dan kota seluruh pulau Sumatera	154 kabupaten dan kota
Jumlah Kota seluruh pulau Sumatera	34 Kota
Jumlah Kabupaten seluruh pulau Sumatera	120 Kabupaten

4.0 Tabel jumlah kabupaten dan kota Se-Sumatera

Adapun data yang diambil adalah ukuran pemerintah daerah (X1), kekayaan pemerintah daerah (X2), tipe pemerintahan daerah (X3), belanja daerah (X4), opini audit BPK (X5) dan ketersediaan LKPD Pemerintah Daerah (Y).

Tabel 4.1
Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Ukuran pemerintah	154	2745	3112	2844.94	53.470
Kekayaan pemerintah	154	2370	2812	2539.27	89.689
Tipe pemerintah	154	0	1	.22	.416
Belanja daerah	154	2697	2907	2777.09	40.488
Opini audit	154	1	5	4.58	.905
Ketersediaan LKPD	154	0	1	.14	.351
Valid N (listwise)	154				

Sumber : Hasil pengolahan SPSS. 20

Tabel 4.1.1 Frekuensi variable Tipe pemerintah (X3)

		Tipe Pemerintah			
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	KAB	120	55.3	77.9	77.9
	KOTA	34	15.7	22.1	100.0
	Total	154	71.0	100.0	

Sumber : Hasil pengolahan SPSS. 20

Tabel 4.1.2 Frekuensi variable Opini audit (X5)

		Opini Audit			
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TMP	3	1.9	1.9	1.9
	WDP	26	16.9	16.9	18.8
	WTP	125	81.6	81.2	100.0
	Total	154	100.0	100.0	

Sumber : Hasil pengolahan SPSS. (2020)

Tabel 4.1.3 Frekuensi variable Ketersediaan LKPD (Y)

		Ketersediaan LKPD			
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TDK ADA	132	85.7	85.7	85.7
	ADA	22	14.3	14.3	100.0
	Total	154	100.0	100.0	

Sumber : Hasil pengolahan SPSS. 20

Berdasarkan hasil Tabel 4.1 bahwa dapat diketahui nilai minimum (min), maximum (max), rata-rata (mean), dan standar deviasi dari masing-masing variabel yang digunakan. Dalam penelitian ini untuk data variable ukuran pemerintah, kekayaan pemerintah, dan belana daerah telah di logaritma naturalkan dikarenakan angka yang muncul milyaran rupiah.

1. Untuk data variable ukuran pemerintah daerah (X1) diperoleh nilai minimum sebesar 27,45 dan nilai maximum sebesar 31,12. Sedangkan untuk nilai rata-rata sebesar 28,4494 dan untuk nilai standar deviasi sebesar 53.470. Hal ini dapat menunjukkan untuk rata rata ukuran pemerintah daerah adalah sebesar 28,4494% dan untuk nilai standar deviasi menunjukkan rata rata penyimpangan ukuran pemerintah daerah terhadap mean sebesar 53,470%.
2. Pada variable kekayaan pemerintah daerah (X2) diperoleh nilai minimum sebesar 23,70 dan nilai maximum sebesar 28,12. Sedangkan untuk nilai rata-rata sebesar 25,3927 dan untuk nilai standar deviasi sebesar 89.689. Hal ini dapat menunjukkan untuk rata rata kekayaan pemerintah daerah adalah sebesar 25,3927% dan untuk nilai standar deviasi menunjukkan rata rata penyimpangan kekayaan pemerintah daerah terhadap mean sebesar 89,689%.
3. Belanja daerah (X4) adalah diperoleh nilai minimum sebesar 26,97 dan nilai maximum sebesar 29,07. Sedangkan untuk nilai rata-rata sebesar 27,7709 dan untuk nilai standar deviasi sebesar 40.488. Hal ini dapat menunjukkan untuk rata rata kekayaan pemerintah daerah adalah sebesar 27,7709% dan untuk nilai standar deviasi menunjukkan rata rata penyimpangan kekayaan pemerintah daerah terhadap mean sebesar 40.488%.
4. Variabel tipe pemerintahan (X3) menggunakan variabel dummy diasumsikan 0 berarti Kabupaten dan 1 berarti Kota. Pada table 4.1.1 menunjukkan bahwa 120 kabupaten (55.3%) dan 34 kota sebesar (15,7%) pemerintah daerah Se-Sumatera.

5. Dapat dilihat dari tabel 4.1.2 variabel opini audit (X5) diketahui ada 125 (81.2%) kabupaten/kota yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan 26 (16,9%) kabupaten/ kota yang mendapatkan opini audit Wajar Dengan Pengecualian (WDP), serta 3 (1,9 %) kabupaten/kota yang memperoleh opini bpk tidak wajar.
6. Variabel ketersediaan LKPD 0 berarti tidak tersedia di situs resmi masing-masing pemda, sedangkan 1 tersedia di situs resmi masing-masing pemda. Adapun data dikumpulkan melalui informasi resmi dari website pemerintah masing-masing daerah sebanyak 132 (85.7%) tidak melaporkan LKPD dalam website pemerintah dan sebanyak 22 (14.3%) melaporkan LKPD diwebsite.

4.2 Hasil Pengujian Hipotesis

Regresi logistik digunakan untuk mengetahui pengaruh dari Ukuran Pemerintah Daerah, Kekayaan Pemerintah Daerah, Tipe Pemerintah Daerah, Belanja Daerah dan Opini Audit Terhadap Ketersediaan LKPD Pada Situs Pemerintahan Daerah di Kabupaten/Kota di Sumatera tahun 2018. Pengujian regresi logistik akan menguji kelayakan regresi dengan melihat:

- *-2 log Likelihood*
- *Cox and Snell R Square dan Nagelkerke R Square*
- *Chi Square (Hosmer and Lemeshow Test)*

4.2.1 Uji -2 log Likelihood

Uji ini digunakan untuk menilai model regresi logistik layak dipakai atau tidak. Hasil pengolahan data dapat dilihat pada Tabel 4.2.1.A dan 4.2.1.B berikut:

Table 4.2.1.A
-2 log likelihood step 0

Iteration History^{a,b,c}

Iteration	-2 Log likelihood	Coefficients
		Constant
1	129.025	-1.429
2	126.346	-1.752
3	126.316	-1.791
4	126.316	-1.792

- a. Constant is included in the model.
 b. Initial -2 Log Likelihood: 126.316
 c. Estimation terminated at iteration number 4 because parameter estimates changed by less than .001.

Sumber : Hasil pengolahan SPSS. 20

Tabel 4.2.1.B
-2 log likelihood step 1

Model Summary

Step	-2 Log likelihood	Cox & Snell R Square	Nagelkerke R Square
1	120.063 ^a	.040	.071

- a. Estimation terminated at iteration number 6 because parameter estimates changed by less than .001.

Sumber : Hasil pengolahan SPSS. 20

Berdasarkan table 4.2.1.A dan 4.2.1.B diatas menunjukkan hasil pengujian -2 log likelihood step 0 dan -2 log likelihood step 1. Hasil yang baik dari penelitian tersebut apabila terjadi penurunan pada nilai -2 log likelihood dari step 0 hingga step 1. Berdasarkan hasil yang dapat dilihat bahwa -2 log likelihood step 0 bernilai 126,316 dan kemudian nilai -2 log likelihood step 1 adalah 120,063. Dapat dilihat terjadi penurunan nilai dari -2 log likelihood step 0 sampai step 1. Dari hasil data dapat menunjukkan bahwa model regresi logistic yang baik dan penambahan variable bebas kedalam model memperbaiki model fit

4.2.2 Uji Nagelkerke R Square

Menguji Nagelkerke R Square uji ini dilakukan untuk menilai seberapa besar variasi dari variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen. Hasil pengujian dapat dilihat pada tabel 4.2.2 sebagai berikut:

Tabel 4.2.2
Nagelkerke R Square

Model Summary			
Step	-2 Log likelihood	Cox & Snell R Square	Nagelkerke R Square
1	120.063 ^a	.040	.071

a. Estimation terminated at iteration number 6 because parameter estimates changed by less than .001.

Dari hasil olah data table 4.2.2 diatas menunjukkan nilai Negelkerke R square adalah sebesar 0,071. Hal ini dapat menunjukkan bahwa variasi dependen yaitu pelaporan LKPD pemerintah daerah dapat dijelaskan oleh variable independen yaitu ukuran pemerintah, kekayaan pemerintah, tipe pemerintah, belanja daerah dan opini audit sebesar 7,1% saja dan 92,9% dijelaskan oleh variable lain diluar dari model penelitian.

4.2.3 Uji Hosmer dan Lemeshow Test

Pada uji Hosmer and Lemeshow dilakukan untuk menguji hipotesis nol (0) bahwa data empiris cocok atau sesuai dengan model (tidak ada perbedaan model dengan data sehingga model dapat dikatakan fit). Jika nilai *Hosmer and Lemeshow Test* sama dengan atau kurang dari 0.05, maka hipotesis nol ditolak berarti ada perbedaan signifikan antara model dengan nilai observasinya sehingga model tidak dapat memprediksi nilai observasinya, sebaliknya jika nilai *Hosmer and Lemeshow Test* lebih besar dari 0.05 maka hipotesis nol diterima yang berarti model mampu memprediksi nilai observasinya atau dapat dikatakan model dapat diterima karena sesuai dengan data observasinya.

Table 4.2.3
Uji Hosmer and Lemeshow

Hosmer and Lemeshow Test			
Step	Chi-square	Df	Sig.
1	4.151	8	.843

Berdasarkan table 4.2.3 dapat dilihat nilai signifikansi dari pengujian Hosmer and Lemeshow yaitu 0,843 lebih besar dari 0,05. Berarti hal ini dapat menunjukkan model bias memprediksi nilai observasi nya atau model dapat diterima karena sesuai dengan data obervasi yang ada.

4.2.4 Uji Logistik secara Parsial

Uji regresi logistik secara parsial dengan melihat table *variables in the equation*. Pengujian hipotesis dengan menggunakan regresi logistik dilakukan dengan memasukkan seluruh variable ukuran pemerintah daerah, kekayaan pemerintah daerah, tipe pemerintah daerah, belanja daerah dan opini audit terhadap ketersediaan LKPD pemerintah daerah. Pengujian ini bertujuan untuk melihat pengaruh dari masing-masing variabel independen. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan metode *enter* dengan tingkat signifikansi sebesar 5%. Dasar pengambilan keputusannya adalah apabila:

nilai signifikansi > 0.05 maka H_0 diterima

nilai signifikansi < 0.05 maka H_0 ditolak.

Hasil pengujian tersebut dapat dilihat pada tabel 4.2.4 berikut:

		Variables in the Equation						95% C.I. for EXP(B)	
		B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)	Lower	Upper
Step 1 ^a	Ukuran	.001	.008	.004	1	.950	1.001	.984	1.017
	Kekayaan	-.003	.005	.453	1	.501	.997	.988	1.006
	Tipe	.764	.664	1.324	1	.250	2.147	.584	7.892
	Belanja	.004	.013	.080	1	.777	1.004	.979	1.029
	Audit	.818	.512	2.550	1	.110	2.266	.830	6.183
	Constant	-9.440	18.792	.252	1	.615	.000		

a. Variable(s) entered on step 1: ukuran,kekayaan,tipe,belanja,audit

Berdasarkan hasil data diatas maka model persamaan regresi logistic nya berikut ini:

$$P = \frac{1}{1 + e^{-9,440 + 0,001x_1 - 0,003x_2 + 0,764x_3 + 0,004x_4 + 0,818x_5}}$$

4.3 Pembahasan

4.3.1 Pengaruh Ukuran Pemerintah Terhadap Ketersediaan LKPD diwebsite Pemerintah Daerah

Dari hasil pengujian regresi logistik variable ukuran pemerintah daerah terhadap ketersediaan LKPD di website pemerintah daerah yang diukur dengan total asset pemerintah daerah menunjukkan bahwa ukuran pemerintah daerah tidak berpengaruh secara signifikansi terhadap ketersediaan LKPD diwebsite pemerintah daerah. Pada penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian meutia (2016) yang menyatakan ukuran pemerintah berpengaruh positif dan signifikansi terhadap ketersediaan laporan keuangan pemerintah daerah. Namun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sejalan dengan penelitian Laswad *et al.* (2005) tidak menemukan hubungan antara ukuran pemerintahan daerah dengan *Internet Financial Reporting (IFR)* dan penelitian Afryansyah dan Haryanto, 2013 yang berpendapat bahwa ukuran pemerintah daerah tidak berpengaruh signifikansi terhadap pelaporan keuangan daerah. Hal ini dapat mengindikasikan bahwa

keengganan dari pejabat pemerintah untuk mengungkap dan melaporkan LKPD ke website pemerintah daerah.

Jika dihubungkan dengan teori ligistimasi seharusnya pemerintah daerah memenuhi hak dan norma yaitu menyediakan informasi mengenai pertanggung jawaban kekayaan daerah atau total aset yang dikelola oleh daerah tersebut dalam bentuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dan pada perkembangan teknologi yang cukup pesat, internet bisa dimanfaatkan untuk menjadi salah satu sarana pertanggung jawaban pemerintah daerah yaitu dengan mempublikasikan informasi keuangan tersebut pada website resmi pemerintah daerah yang dapat diakses masyarakat..

4.3.2 Pengaruh Kekayaan Pemerintah Terhadap Ketersediaan LKPD di website Pemerintah Daerah

Hasil pengujian regresi logistik variable kekayaan pemerintah daerah terhadap ketersediaan LKPD di website pemerintah daerah yang diukur dengan realisasi pendapatan asli daerah (PAD) pemerintah daerah menyatakan bahwa variable kekayaan pemerintah daerah tidak berpengaruh secara signifikansi terhadap ketersediaan laporan keuangan daerah (LKPD). Hal ini tidak sejalan dengan penelitian kadek ari dewi dan pratama (2015) yang berpendapat kekayaan pemerintah berpengaruh terhadap ketersediaan LKPD di situs pemerintah daerah. Namun hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Sulis Setyorini (2020) dan Muetia (2016) yang menyatakan hasil data dari kekayaan pemerintah tidak berpengaruh signifikansi terhadap ketersediaan LKPD.

Dari data tersebut dapat di lihat bahwa kekayaan pemerintah yang diukur melalui tingkat realisasi pendapatan asli daerah (PAD) tidak menentukan terhadap ketersediaan LKPD diwebsite pemerintah walaupun pendapatan asli daerah merupakan factor pendukung dan penunjang dari kinerja ekonomi makro daerah.

4.3.3 Pengaruh tipe pemerintah terhadap ketersediaan LKPD di website pemerintah daerah

Dapat dilihat hasil pengujian regresi logistic variable tipe pemerintah daerah

terhadap ketersediaan LKPD di website pemerintah daerah yang diukur dengan menggunakan variable dummy yaitu jika 0 merupakan kabupaten dan jika 1 merupakan kota. Dapat dinyatakan bahwa tipe pemerintah daerah tidak berpengaruh secara signifikansi terhadap ketersediaan laporan keuangan daerah (LKPD). Menurut hasil penelitian ini berbanding lurus dengan penelitian Meutia (2016) yang menyatakan bahwa tipe pemerintah tidak berpengaruh terhadap ketersediaan LKPD.

Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan wewenang antara Kabupaten dan Kota dalam melaporkan LKPD di situs resmi Kota/Kabupaten yang ada di seluruh pemerintah Se-Sumatera. Hal ini mengindikasikan bahwa secara umum baik kabupaten maupun kota memiliki wewenang yang sama yaitu mengatur dan mengurus pemerintahannya sendiri. Selain itu, kedudukan kabupaten dan kota adalah sama/sejajar yaitu dibawah provinsi atau biasa disebut dengan daerah tingkat II. Tipe pemerintahan daerah kabupaten/kota yang relatif sama tidak akan mempengaruhi suatu kebijakan baik dalam perlakuan untuk pemeriksaan maupun penganggaran terhadap pemerintah daerah tersebut.

4.3.4 Pengaruh belanja daerah terhadap ketersediaan LKPD di website pemerintah daerah

Dari hasil pengujian regresi logistic variable belanja daerah terhadap ketersediaan LKPD di website pemerintah daerah yang diukur dengan realisasi belanja pemerintah daerah menunjukkan bahwa belanja daerah tidak berpengaruh secara signifikansi terhadap ketersediaan laporan keuangan daerah (LKPD). Hasil penelitian ini berbanding lurus dengan penelitian Christina (2016) yang menyatakan bahwa belanja daerah tidak berpengaruh signifikansi terhadap pelaporan keuangan daerah.

Hasil ini mengindikasikan bahwa besar atau kecilnya nilai realisasi belanja daerah tidak berpengaruh terhadap ketersediaan LKPD di website pemerintah walaupun belanja daerah digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

4.3.5 Pengaruh opini audit terhadap ketersediaan LKPD di website pemerintah daerah

Hasil pengujian regresi logistik variable opini audit terhadap ketersediaan LKPD di website pemerintah daerah yang diukur dengan opini audit yang diberikan BPK pada tahun 2018 kepada pemerintah daerah menunjukkan bahwa opini audit tidak berpengaruh signifikansi terhadap ketersediaan LKPD di website pemerintah daerah. Pada hasil ini didukung dengan penelitian muetia (2016) dan ramadhiautami (2019) yang berpendapat bahwa opini audit tidak berpengaruh terhadap ketersediaan LKPD pemerintah daeah.

Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa tidak ada nya pengaruh apakah opini audit itu WTP,WDP,dan TW dapat membuat pemerintah Kota/Kabupaten menginformasikan LKPD pada website pemerintah. Opini aduti diberikan oleh BPK dilihat dari beberapa kriteria yaitu salah satu nya kecukupan pengungkapan, tidak semua pengungkapan yang tinggi dapat memperoleh opini yang baik begitupun dengan sebalik nya jika pengungkapan yang rendah dapat memberikan opini yang buruk.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti secara empiris yang mempengaruhi ketersediaan LKPD di website pemerintah daerah Kabupaten/kota Se-Sumatera. Variable dependen dalam penelitian ini adalah ukuran pemerintah,kekayaan pemerintah, tipe pemerintah, belanja daerah dan opini audit, independen dalam penelitian ini adalah ketersediaan LKPD diwebsite pemerintah daerah kabupaten/kota Se-sumatera. Penelitian ini menggunakan sampel Kabupaten dan Kota seluruh provinsi Se-Sumatera dalam tahun 2018. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan dengan ini maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Ukuran pemerintahan daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap ketersediaan LKPD Kabupaten/Kota di seluruh provinsi Se-Sumatera.
2. Kekayaan pemerintah daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap ketersediaan LKPD Kabupaten/Kota di seluruh provinsi Se-Sumatera.
3. Tipe Pemerintah Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap ketersediaan LKPD Kabupaten/Kota di seluruh provinsi Se-Sumatera.
4. Belanja Daerah tidak berpengaruh signifikansi terhadap ketersediaan LKPD pada website pemerintah Kabupaten/Kota di seluruh provinsi Se-Sumatera.
5. Opini Audit BPK tidak berpengaruh signifikan terhadap ketersediaan LKPD Kabupaten/Kota di seluruh provinsi Se-Sumatera.

5.2 Keterbatasan penelitian

Peneliti menyadari bahwa di dalam penelitian ini masih memiliki keterbatasan yang mempengaruhi hasil dari penelitian dan perlu diperbaiki oleh peneliti selanjutnya. Adapun keterbatasan-keterbatasan tersebut antara lain:

1. Ketersediaan sampel yang digunakan dalam penelitian ini hanya pemerintah kota dan kabupaten Se-Sumatera saja yang mempublikasikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada tahun 2018, sehingga objek pengamatan kurang luas.
2. Transparansi Informasi Keuangan hanya dinilai dari ada atau tidak Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) pada *website* resmi pemerintah daerah tanpa memperhatikan seberapa banyak informasi keuangan lain yang disajikan. Sehingga belum menggambarkan tinggi atau rendahnya transparansi ketersediaan LKPD pada *website* pemerintah daerah.

5.3 Saran

Berdasarkan keterbatasan peneliti maka beberapa saran yang dapat diberikan peneliti untuk para peneliti selanjutnya agar lebih baik adalah:

1. Untuk peneliti selanjutnya disarankan menambah variabel lain yang memungkinkan untuk menyempurnakan penelitian ini.
2. Peneliti selanjutnya sebaiknya memperluas objek penelitian sehingga dapat lebih meningkatkan generalisasi hasil penelitian.
3. Peneliti selanjutnya dapat mempertimbangkan untuk mengembangkan indeks transparansi informasi keuangan sesuai banyaknya informasi keuangan pada *website* resmi pemerintah daerah sehingga memberikan gambaran yang lebih akurat akan tinggi rendahnya tingkat transparansi informasi keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhariani Sarah, Rini, 2014. *Opini Audit Dan Pengungkapan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Serta Kaitannya Dengan Korupsi Di Indonesia*. Jurnal Etikonomi, Vol 13 No.1.
- Afryansyah, R. D. & Haryanto. (2013). *Faktor-Faktor yang Memengaruhi Pengungkapan Informasi Akuntansi di Internet oleh Pemerintah Daerah*. Diponegoro Journal of Accounting, Vol. 2, No. 3.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2007. *Peraturan BPK-RI No. 1 Tahun 2007 Tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara*.
- Christaens, J. (1999). *Financial Accounting Reform in Flemish Municipalities: An Empirical Investigation*. *Financial Accountability & Management*, 15 (1), 21-40.
- Christina, S. E. "PENGARUH UKURAN PEMERINTAH DAERAH, RASIO KEMANDIRIAN DAERAH, RASIO PEMBIAYAAN HUTANG, DAN BELANJA DAERAH TERHADAP PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH Oleh." *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Ekonomi Volume 2.1* (2016): 1.
- Daerah dan Belanja Modal sebagai Prediktor Kelemahan Pengendalian Intern. Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*.
- Hartati, Y. 2011. *Analisis Pengungkapan Laporan Keuangan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (Study Padang Pariaman & Kota Pariaman)*. Jurnal Universitas Andalas.
- Hermana, B., Tarigan, A., Medyawati, and H., Silfianti, W. 2012. Information Richness, Website Feature, and Financial Transparency on the Local Government Website in Indonesia. *Journal of Theoretical and Applied Information Technology*, Vol 43 No.2: 229-235.
- Jurnal Akuntansi UKRIDA, Volume 9, No.1.*

- Kristanto, Septian Bayu (2009). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli.
- Kusumawardani, Fitria. 2012. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Audit Delay pada Perusahaan Manufaktur*. ISSN 2252-6765.
- Laswad, F, R. Fisher, &P. Oyelere. 2005. "Determinents of Voluntary Internet Financial Reporting by Local Government Authorities. *Journal of Accounting and Public Policy* , 24: 101-121.
- Latif,A.,Wahyu,W.,&Surjono.(2012). *Penilaian E-Audit Readiness dengan Pendekatan Framework STOPE pada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Banten*. Jnteti, 1(2), 1–9.
- Margono, Drs. S. Margono (2004) *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Meutia, Nazura "Pengaruh ukuran pemerintah,kekayaan pemerintah,tipe pemerintah, dan opini audit terhadap ketersediaan LKPD disitus pemerintah daerah pada kabupaten dan kota se-sumatera ." *repositorinstitusi USU, Universitas Sumatera Utara*
- Napitupulu,D.(2015). *Kajian Faktor Sukses Implementasi E-Government Studi Kasus:PemerintahKabupatenBogor*.JurnalSistemInformasi,5(3),229236.
- Nirmala,Rr Putri Arsika dan N. Cahyonowati. 2013. *Pengaruh Independensi,Pengalaman, Due Professional Care, Akutabilitas, Kompleksitas Audit,Dan ime Bedget Pressure Terhadap Kualitas Audit (Studi Empiris PadaAuditor Kap Di Jawa Tengah Dan DIY)*. Diponegoro Jounal OfAccounting. Vol 2, No. 3, Hal: 1-13.
- PP Nomor 24 Tahun 2004) Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
- Prasidhanto, Wiratmoko. (2012). Studi Biaya Tenaga Kerja Badan Usaha Milik Negara (BUMN): Kontribusi Pegawai dan Eksekutif Terhadap Kinerja Perusahaan. Jurnal Kementrian Badan Usaha Milik Negara. Jakarta: Kementrian Badan Usaha Milik Negara.
- Pratama, Kadek Aris Dwi, et al. "Pengaruh kompleksitas pemerintah daerah, ukuran pemerintah daerah, kekayaan daerah, dan belanja daerah terhadap pelaporan keuangan pemerintah daerah (studi pada pemerintah

- kabupaten/kota di Bali tahun 2010-2013)." *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha* 3.1 (2015).
- Pratiwi dan Aryani.(2016). *Pengaruh karakteristik pemerintah daerah, Kepala daerah, tindak lanjut temuan audit terhadap opini. Jurnal Akuntansi/Volume XX, No. 02, Mei 2016: 167-189 Retrieved November 13, 2018,*
- SA 508 paragraf 20 (IAI, 2002:508.11).
- SAP Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Standar Profesional Akuntan (PSA 29).
- Serrano-Cinca, Carlos, Mar Rueda-Tomas, Pilar Portillo-Tarragona. (2008). *Factors Influencing E-disclosure in Local Public Administrations. Working Paper No.2008-03, Faculted de Ciencias Economicas y Empresariales, Universidad de Zaragoza.*
- Setyorini, Sulis, Yuli Tri Cahyono, and Ak MM. *Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Kemandirian Pemerintah Daerah, Kekayaan Pemerintah Daerah Dan Intergovernmental Revenue Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2015-2017)*. Diss. Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2020.
- Styles, Alan K., Mack Tennyson. (2007). *The Accessibility of Financial Reporting*
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suhardjanto, Djoko., Yulianingtyas, Rena Rukmita. 2011. 'Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap Kepatuhan Pengungkapan Wajib dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Kabupaten/Kota di Indonesia). *Jurnal Akuntansi & Auditing. Volume 8/No.1/November 2011: 1- 194.*
- Sumarjo, Hendro. 2010. *Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Indonesia*. Skripsi Sarjana. Universitas Sebelas Maret. Surakarta.

- Tobing, Elwin. (2004). *Pendidikan Pasar Tenaga Kerja dan Kewiraswastaan*. Jakarta.
- Trisnawati, Komarudin. 2014. Determinan Publikasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Melalui Internet. *Jurnal Universitas Brawijaya*.
- U.S. Municipalities on The Internet*. Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management, 19 (1), 56-92.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang *Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2008 tentang *Keterbukaan Informasi Publik*.
- Wau, Ikhlas, 2015. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketersediaan Dan Keteraksesan Internet Financia Reporting Oleh Pemerintah Daerah*. Skripsi Sarjana. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Widowati, D. P. D. (2018). *Survei PBB 2018: Peringkat E-Government Indonesia*.
- _____. 2014. *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester 1 Tahun 2014*. BPK-RI 2014.
- _____. 2016. *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester 1 Tahun 2016*. BPK-RI 2016

LAMPIRAN

Entitas Pemerintahan Daerah	Status	Ketersediaan LKPD
		Y 2018
Kab. Aceh Barat	perda	1
Kab. Aceh Besar	perda	0
Kab. Aceh Selatan	perda	0
Kab. Aceh Singkil	perda	0
Kab. Aceh Tengah	audited	0
Kab. Aceh Tenggara	perda	1
Kab. Aceh Timur	perda	0
Kab. Aceh Utara	perda	0
Kab. Bireuen	perda	1
Kab. Pidie	perda	0
Kab. Simeulue	audited	0
Kota Banda Aceh	perda	1
Kota Sabang	audited	0
Kota Langsa	perda	0
Kota Lhokseumawe	perda	1
Kab. Gayo Lues	perda	0
Kab. Aceh Barat Daya	perda	0
Kab. Aceh Jaya	perda	0
Kab. Nagan Raya	perda	0
Kab. Aceh Tamiang	perda	0
Kab. Bener Meriah	perda	0
Kab. Pidie Jaya	perda	0
Kota Subulussalam	perda	0
Kab. Asahan	perda	0
Kab. Dairi	audited	0
Kab. Deli Serdang	perda	0
Kab. Karo	audited	0
Kab. Labuhanbatu	perda	0
Kab. Langkat	perda	0
Kab. Mandailing Natal	audited	0
Kab. Nias	perda	0
Kab. Simalungun	audited	0
Kab. Tapanuli Selatan	perda	0
Kab. Tapanuli Tengah	perda	0
Kab. Tapanuli Utara	perda	1
Kab. Toba Samosir	perda	0

Kota Binjai	perda	0
Kota Medan	perda	0
Kota Pematang Siantar	perda	0
Kota Sibolga	perda	0
Kota Tanjung Balai	audited	0
Kota Tebing Tinggi	perda	0
Kota Padang Sidempuan	audited	0
Kab. Pakpak Bharat	perda	0
Kab. Nias Selatan	perda	0
Kab. Humbang Hasundutan	perda	0
Kab. Serdang Bedagai	audited	0
Kab. Samosir	audited	1
Kab. Batu Bara	audited	0
Kab. Padang Lawas	audited	0
Kab. Padang Lawas Utara	perda	0
Kab. Labuhanbatu Selatan	perda	1
Kab. Labuhanbatu Utara	audited	0
Kab. Nias Utara	audited	0
Kab. Nias Barat	audited	0
Kota Gunungsitoli	audited	1
Kab. Limapuluh Kota	perda	1
Kab. Agam	perda	0
Kab. Kepulauan Mentawai	perda	0
Kab. Padang Pariaman	perda	0
Kab. Pasaman	perda	0
Kab. Pesisir Selatan	perda	0
Kab. Sijunjung	audited	0
Kab. Solok	perda	0
Kab. Tanah Datar	perda	0
Kota Bukit Tinggi	perda	0
Kota Padang Panjang	perda	0
Kota Padang	audited	0
Kota Payakumbuh	perda	1
Kota Sawahlunto	perda	0
Kota Solok	audited	0
Kota Pariaman	perda	1
Kab. Pasaman Barat	perda	0
Kab. Dharmasraya	perda	0
Kab. Solok Selatan	perda	0
Kab. Bengkalis	audited	0
Kab. Indragiri Hilir	audited	0
Kab. Indragiri Hulu	perda	1
Kab. Kampar	perda	0

Kab. Kuantan Singingi	perda	0
Kab. Pelalawan	perda	0
Kab. Rokan Hilir	perda	0
Kab. Rokan Hulu	audited	0
Kab. Siak	perda	0
Kota Dumai	perda	0
Kota Pekanbaru	perda	1
Kab. Kepulauan Meranti	perda	0
Kab. Batanghari	perda	0
Kab. Bungo	perda	0
Kab. Kerinci	perda	0
Kab. Merangin	perda	0
Kab. Muaro Jambi	perda	0
Kab. Sarolangun	perda	1
Kab. Tanjung Jabung Barat	perda	0
Kab. Tanjung Jabung Timur	perda	0
Kab. Tebo	perda	0
Kota Jambi	perda	0
Kota Sungai Penuh	perda	0
Kab. Lahat	perda	0
Kab. Musi Banyuasin	perda	0
Kab. Musi Rawas	perda	0
Kab. Muara Enim	perda	0
Kab. Ogan Komering Ilir	perda	0
Kab. Ogan Komering Ulu	perda	0
Kota Palembang	perda	0
Kota Prabumulih	perda	0
Kota Pagar Alam	perda	0
Kota Lubuk Linggau	perda	0
Kab. Banyuasin	perda	0
Kab. Ogan Ilir	perda	0
Kab. OKU Timur	perda	1
Kab. OKU Selatan	perda	0
Kab. Empat Lawang	perda	0
Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	perda	0
Kab. Musi Rawas Utara	perda	0
Kab. Bengkulu Selatan	audited	0
Kab. Bengkulu Utara	perda	0
Kab. Rejang Lebong	perda	0
Kota Bengkulu	perda	0
Kab. Kaur	audited	0
Kab. Seluma	audited	0
Kab. Mukomuko	audited	0

Kab. Lebong	audited	1
Kab. Kepahiang	perda	0
Kab. Bengkulu Tengah	audited	0
Kab. Lampung Barat	perda	1
Kab. Lampung Selatan	perda	0
Kab. Lampung Tengah	perda	1
Kab. Lampung Utara	perda	0
Kab. Lampung Timur	perda	0
Kab. Tanggamus	perda	0
Kab. Tulang Bawang	perda	0
Kab. Way Kanan	perda	0
Kota Bandar Lampung	audited	0
Kota Metro	perda	0
Kab. Pesawaran	perda	0
Kab. Pringsewu	perda	0
Kab. Mesuji	perda	0
Kab. Tulang Bawang Barat	perda	0
Kab. Pesisir Barat	audited	0
Kab. Bangka	perda	0
Kab. Belitung	perda	0
Kota Pangkal Pinang	audited	0
Kab. Bangka Selatan	perda	0
Kab. Bangka Tengah	audited	0
Kab. Bangka Barat	perda	0
Kab. Belitung Timur	perda	0
Kab. Natuna	audited	1
Kab. Kepulauan Anambas	perda	0
Kab. Karimun	perda	0
Kota Batam	perda	1
Kota Tanjung Pinang	audited	0
Kab. Lingga	perda	0
Kab. Bintan	audited	1

Ukuran pemerintah	LN	Kekayaan pemerintah	LN	Tipe pemerintah
X1	X1	X2	X2	X3
2018		2018		2018
Rp 2.900.992.705.011	28,70	Rp 150.499.049.236	25,74	0
Rp 2.983.677.539.865	28,72	Rp 159.480.163.138	25,80	0
Rp 2.622.528.127.390	28,60	Rp 152.071.795.581	25,75	0

Rp 1.512.446.695.492	28,04	Rp 45.289.515.137	24,54	0
Rp 2.368.548.554.462	28,49	Rp 150.818.710.372	25,74	0
Rp 3.048.906.250.689	28,75	Rp 80.263.476.272	25,11	0
Rp 3.137.985.896.264	28,77	Rp 169.455.864.158	25,86	0
Rp 4.706.929.566.142	29,18	Rp 231.848.856.926	26,17	0
Rp 2.850.283.924.350	28,68	Rp 179.476.248.778	25,91	0
Rp 3.137.345.450.716	28,77	Rp 237.201.958.016	26,19	0
Rp 1.641.871.162.689	28,13	Rp 63.146.021.911	24,87	0
Rp 5.615.309.114.795	29,36	Rp 246.272.150.485	26,23	1
Rp 1.311.128.243.281	27,90	Rp 57.188.076.200	24,77	1
Rp 1.813.733.115.667	28,23	Rp 121.316.713.329	25,52	1
Rp 1.537.493.771.796	28,06	Rp 65.618.966.778	24,91	1
Rp 1.984.455.956.330	28,32	Rp 48.758.464.134	24,61	0
Rp 1.893.684.282.690	28,27	Rp 83.468.426.211	25,15	0
Rp 2.278.943.397.243	28,45	Rp 58.624.901.408	24,79	0
Rp 1.852.337.739.778	28,25	Rp 97.118.515.691	25,30	0
Rp 2.547.049.639.155	28,57	Rp 139.261.841.912	25,66	0
Rp 1.601.123.598.710	28,10	Rp 67.961.546.855	24,94	0
Rp 1.658.509.856.537	28,14	Rp 57.432.814.785	24,77	0
Rp 1.246.617.250.114	27,85	Rp 38.955.598.635	24,39	1
Rp 3.382.372.576.944	28,85	Rp 142.972.039.821	25,69	0
Rp 1.960.715.216.685	28,30	Rp 73.906.829.603	25,03	0
Rp 7.561.388.637.096	29,65	Rp 729.648.594.489	27,32	0
Rp 2.534.254.911.297	28,56	Rp 159.189.197.472	25,79	0

Rp 2.624.518.212.280	28,60	Rp 162.794.472.017	25,82	0
Rp 4.308.590.339.397	29,09	Rp 136.680.578.541	25,64	0
Rp 1.968.191.256.127	28,31	Rp 84.809.923.496	25,16	0
Rp 2.090.783.598.807	28,37	Rp 88.754.606.115	25,21	0
Rp 3.470.212.732.920	28,88	Rp 164.107.850.129	25,82	0
Rp 2.264.430.882.311	28,45	Rp 140.044.217.234	25,67	0
Rp 1.594.284.997.845	28,10	Rp 76.660.883.410	25,06	0
Rp 1.969.293.457.672	28,31	Rp 105.656.762.964	25,38	0
Rp 1.643.153.956.601	28,13	Rp 52.298.960.803	24,68	0
Rp 1.325.903.919.602	27,91	Rp 135.870.920.433	25,63	1
Rp 32.835.917.510.688	31,12	Rp 1.636.204.514.684	28,12	1
Rp 3.106.010.609.147	28,76	Rp 137.052.839.193	25,64	1
Rp 1.585.971.177.854	28,09	Rp 81.245.733.812	25,12	1
Rp 1.441.897.974.121	28,00	Rp 74.435.277.572	25,03	1
Rp 1.781.013.233.985	28,21	Rp 114.048.354.143	25,46	1
Rp 1.212.665.087.136	27,82	Rp 75.063.575.093	25,04	1
Rp 946.757.502.208	27,58	Rp 20.061.207.923	23,72	0
Rp 1.796.429.399.896	28,22	Rp 19.605.734.782	23,70	0
Rp 1.851.021.197.090	28,25	Rp 92.735.853.813	25,25	0
Rp 2.148.275.622.345	28,40	Rp 194.382.972.213	25,99	0
Rp 1.541.818.414.706	28,06	Rp 47.446.623.389	24,58	0
Rp 2.104.078.296.855	28,37	Rp 64.385.292.862	24,89	0
Rp 1.527.507.797.060	28,05	Rp 47.455.308.607	24,58	0
Rp 1.301.600.964.581	27,89	Rp 74.306.097.500	25,03	0

Rp 1.361.827.626.394	27,94	Rp 52.209.768.574	24,68	0
Rp 2.282.439.427.133	28,46	Rp 57.010.690.546	24,77	0
Rp 1.746.804.615.804	28,19	Rp 50.395.504.636	24,64	0
Rp 1.128.955.962.057	27,75	Rp 40.193.008.207	24,42	0
Rp 1.646.901.039.596	28,13	Rp 29.456.354.563	24,11	1
Rp 1.614.113.052.519	28,11	Rp 73.440.842.296	25,02	0
Rp 1.935.999.446.525	28,29	Rp 99.684.205.378	25,33	0
Rp 1.509.079.864.555	28,04	Rp 45.358.184.274	24,54	0
Rp 1.230.967.601.085	27,84	Rp 84.502.722.191	25,16	0
Rp 1.866.283.283.056	28,25	Rp 100.067.231.370	25,33	0
Rp 2.119.482.060.722	28,38	Rp 123.906.524.443	25,54	0
Rp 1.681.904.631.169	28,15	Rp 79.055.940.215	25,09	0
Rp 1.698.249.570.573	28,16	Rp 68.301.516.506	24,95	0
Rp 1.254.031.334.684	27,86	Rp 115.914.187.915	25,48	0
Rp 1.445.331.498.036	28,00	Rp 101.936.792.227	25,35	1
Rp 1.222.738.376.767	27,83	Rp 79.752.372.830	25,10	1
Rp 7.125.104.872.208	29,59	Rp 487.937.882.412	26,91	1
Rp 1.236.485.392.786	27,84	Rp 94.287.442.042	25,27	1
Rp 869.154.740.431	27,49	Rp 47.227.132.335	24,58	1
Rp 1.440.883.615.416	28,00	Rp 40.742.809.270	24,43	1
Rp 833.400.056.881	27,45	Rp 32.213.303.037	24,20	1
Rp 2.056.226.233.477	28,35	Rp 158.872.998.659	25,79	0
Rp 2.429.453.615.523	28,52	Rp 110.208.800.135	25,43	0
Rp 1.802.642.385.364	28,22	Rp 60.545.296.360	24,83	0

Rp 9.037.791.429.167	29,83	Rp 319.280.511.092	26,49	0
Rp 3.886.004.688.631	28,99	Rp 157.482.353.687	25,78	0
Rp 3.185.025.606.938	28,79	Rp 111.900.731.074	25,44	0
Rp 4.085.230.964.652	29,04	Rp 229.958.839.238	26,16	0
Rp 2.461.090.638.672	28,53	Rp 93.227.855.868	25,26	0
Rp 4.741.935.353.530	29,19	Rp 136.697.900.751	25,64	0
Rp 5.630.169.394.895	29,36	Rp 108.053.525.787	25,41	0
Rp 9.037.791.429.167	29,83	Rp 85.734.030.158	25,17	0
Rp 5.941.420.051.531	29,41	Rp 290.637.100.257	26,40	0
Rp 2.785.056.552.200	28,66	Rp 279.654.914.442	26,36	1
Rp 7.398.075.505.045	29,63	Rp 592.707.161.812	27,11	1
Rp 2.694.966.302.985	28,62	Rp 68.006.356.887	24,94	0
Rp 1.781.076.477.943	28,21	Rp 98.808.531.272	25,32	0
Rp 1.667.191.847.320	28,14	Rp 133.848.451.059	25,62	0
Rp 1.615.077.249.660	28,11	Rp 80.481.173.935	25,11	0
Rp 2.021.300.386.072	28,33	Rp 89.304.559.028	25,22	0
Rp 2.253.551.124.881	28,44	Rp 90.305.498.363	25,23	0
Rp 2.390.914.379.250	28,50	Rp 118.828.593.872	25,50	0
Rp 3.796.985.925.236	28,97	Rp 101.840.551.798	25,35	0
Rp 1.928.366.073.703	28,29	Rp 49.607.102.060	24,63	0
Rp 2.238.942.761.962	28,44	Rp 76.160.028.618	25,06	0
Rp 3.480.765.299.458	28,88	Rp 338.891.882.593	26,55	1
Rp 1.263.657.635.575	27,87	Rp 34.184.049.669	24,26	1
Rp 2.856.418.876.322	28,68	Rp 112.571.296.475	25,45	0

Rp 8.353.874.228.229	29,75	Rp 210.238.037.283	26,07	0
Rp 3.941.875.496.734	29,00	Rp 106.289.385.326	25,39	0
Rp 5.078.067.884.927	29,26	Rp 232.468.708.584	26,17	0
Rp 3.768.092.450.326	28,96	Rp 235.946.143.259	26,19	0
Rp 3.023.833.387.814	28,74	Rp 156.622.053.791	25,78	0
Rp 14.360.384.701.028	30,30	Rp 953.302.082.628	27,58	1
Rp 2.451.694.251.549	28,53	Rp 90.910.521.066	25,23	1
Rp 2.120.901.383.260	28,38	Rp 73.600.344.354	25,02	1
Rp 2.421.662.223.475	28,52	Rp 105.606.815.787	25,38	1
Rp 4.049.248.750.620	29,03	Rp 140.602.072.490	25,67	0
Rp 2.093.955.907.157	28,37	Rp 55.362.963.113	24,74	0
Rp 2.244.042.008.098	28,44	Rp 85.235.157.421	25,17	0
Rp 2.778.115.237.400	28,65	Rp 42.993.134.752	24,48	0
Rp 2.075.363.736.689	28,36	Rp 32.217.492.489	24,20	0
Rp 2.403.430.647.148	28,51	Rp 74.392.980.925	25,03	0
Rp 1.864.851.692.819	28,25	Rp 30.141.830.710	24,13	0
Rp 1.220.558.889.229	27,83	Rp 67.243.733.480	24,93	0
Rp 1.611.320.910.558	28,11	Rp 117.688.313.638	25,49	0
Rp 1.513.698.262.257	28,05	Rp 84.508.249.815	25,16	0
Rp 1.798.913.543.678	28,22	Rp 182.884.786.442	25,93	1
Rp 1.237.205.533.105	27,84	Rp 37.085.958.441	24,34	0
Rp 1.596.427.099.061	28,10	Rp 58.028.361.578	24,78	0
Rp 1.641.014.609.270	28,13	Rp 85.747.717.510	25,17	0
Rp 1.561.519.231.664	28,08	Rp 35.309.104.727	24,29	0

Rp 1.214.275.007.121	27,83	Rp 34.444.903.016	24,26	0
Rp 1.251.627.320.958	27,86	Rp 23.500.020.786	23,88	0
Rp 2.174.055.841.418	28,41	Rp 50.471.541.309	24,64	0
Rp 3.351.413.355.426	28,84	Rp 215.411.464.186	26,10	0
Rp 3.253.872.868.186	28,81	Rp 165.414.825.486	25,83	0
Rp 2.447.783.506.378	28,53	Rp 102.289.605.032	25,35	0
Rp 2.519.705.992.781	28,56	Rp 125.035.523.317	25,55	0
Rp 2.132.701.158.666	28,39	Rp 61.714.421.073	24,85	0
Rp 2.159.983.898.446	28,40	Rp 67.129.955.995	24,93	0
Rp 2.390.406.586.376	28,50	Rp 56.764.985.088	24,76	0
Rp 4.845.482.340.685	29,21	Rp 550.275.048.130	27,03	1
Rp 2.808.143.461.945	28,66	Rp 132.202.276.039	25,61	1
Rp 2.117.076.230.779	28,38	Rp 58.265.161.929	24,79	0
Rp 2.063.358.231.315	28,36	Rp 71.824.582.142	25,00	0
Rp 1.663.200.038.761	28,14	Rp 33.206.360.524	24,23	0
Rp 1.959.122.444.549	28,30	Rp 27.613.469.636	24,04	0
Rp 1.486.793.686.058	28,03	Rp 23.481.041.773	23,88	0
Rp 1.906.039.597.185	28,28	Rp 1.094.530.542.128	27,72	0
Rp 2.075.843.726.925	28,36	Rp 963.227.529.031	27,59	0
Rp 2.991.807.700.072	28,73	Rp 915.529.305.585	27,54	1
Rp 1.459.982.642.594	28,01	Rp 865.625.218.280	27,49	0
Rp 1.386.095.748.341	27,96	Rp 890.396.701.515	27,51	0
Rp 1.379.362.305.809	27,95	Rp 866.847.770.185	27,49	0
Rp 1.469.108.386.396	28,02	Rp 824.439.488.088	27,44	0

Rp 2.586.148.105.720	28,58	Rp 47.952.668.665	24,59	0
Rp 1.659.742.334.884	28,14	Rp 35.178.837.744	24,28	0
Rp 2.155.022.302.246	28,40	Rp 349.015.269.518	26,58	0
Rp 4.304.642.843.784	29,09	Rp 1.084.640.559.853	27,71	1
Rp 1.580.666.189.075	28,09	Rp 160.470.588.594	25,80	1
Rp 1.751.538.918.104	28,19	Rp 30.072.594.172	24,13	0
Rp 2.476.251.173.058	28,54	Rp 286.602.276.550	26,38	0

Belanja daerah		Opini audit
X4	LN X3	X5
2018		2018
Rp 1.216.330.094.839	27,83	5
Rp 1.722.230.686.432	28,17	5
Rp 1.353.576.313.273	27,93	5
Rp 742.719.614.812	27,33	5
Rp 1.237.325.224.753	27,84	5
Rp 1.183.205.766.729	27,80	5
Rp 1.598.092.113.140	28,10	5
Rp 2.250.884.305.483	28,44	5
Rp 1.761.174.172.771	28,20	5
Rp 1.981.012.635.468	28,31	5
Rp 845.887.312.546	27,46	5
Rp 1.173.868.935.019	27,79	5
Rp 599.239.877.446	27,12	5
Rp 792.041.640.361	27,40	5
Rp 775.480.033.294	27,38	5
Rp 872.242.666.103	27,49	5
Rp 814.001.631.138	27,43	5
Rp 792.016.394.505	27,40	5
Rp 987.053.457.995	27,62	5
Rp 1.124.418.267.064	27,75	5
Rp 879.570.548.409	27,50	5
Rp 1.196.166.427.181	27,81	5
Rp 562.252.542.605	27,06	5
Rp 1.623.250.765.025	28,12	5
Rp 1.146.806.000.882	27,77	5

Rp 3.422.610.573.015	28,86	5
Rp 1.397.789.814.252	27,97	3
Rp 1.150.307.799.141	27,77	3
Rp 2.224.110.114.424	28,43	3
Rp 1.506.945.739.448	28,04	3
Rp 930.217.782.108	27,56	3
Rp 2.269.698.962.408	28,45	1
Rp 1.315.263.549.408	27,91	5
Rp 1.150.971.725.737	27,77	3
Rp 1.293.977.148.594	27,89	5
Rp 1.055.027.173.780	27,68	5
Rp 934.603.498.530	27,56	5
Rp 4.215.003.353.126	29,07	3
Rp 994.512.015.481	27,63	3
Rp 636.738.976.517	27,18	5
Rp 657.820.622.732	27,21	1
Rp 746.857.086.076	27,34	5
Rp 821.661.404.531	27,43	3
Rp 516.045.557.942	26,97	3
Rp 1.171.732.688.457	27,79	3
Rp 918.952.770.451	27,55	5
Rp 1.565.814.462.172	28,08	5
Rp 803.883.721.733	27,41	5
Rp 996.421.074.024	27,63	5
Rp 1.067.060.547.331	27,70	3
Rp 1.081.855.421.645	27,71	5
Rp 870.934.573.887	27,49	5
Rp 976.397.417.371	27,61	3
Rp 745.799.698.074	27,34	3
Rp 709.386.520.464	27,29	1
Rp 702.837.581.848	27,28	3
Rp 1.245.812.181.546	27,85	5
Rp 1.387.560.260.049	27,96	5
Rp 900.575.703.006	27,53	5
Rp 1.326.772.029.390	27,91	3
Rp 981.817.133.898	27,61	5
Rp 1.569.020.950.589	28,08	5
Rp 958.138.802.509	27,59	5
Rp 1.167.506.886.283	27,79	5
Rp 1.238.097.675.117	27,84	5
Rp 705.251.103.984	27,28	5
Rp 613.485.173.923	27,14	5
Rp 2.177.972.844.481	28,41	5

Rp	716.396.747.761	27,30	5
Rp	582.394.700.608	27,09	5
Rp	648.548.438.881	27,20	5
Rp	634.781.641.164	27,18	5
Rp	1.169.523.754.459	27,79	5
Rp	931.599.585.815	27,56	5
Rp	768.856.472.997	27,37	5
Rp	3.159.072.534.491	28,78	5
Rp	1.800.129.602.824	28,22	5
Rp	1.310.968.027.906	27,90	5
Rp	2.168.293.382.295	28,40	5
Rp	1.344.118.782.700	27,93	5
Rp	1.279.027.719.741	27,88	5
Rp	1.625.839.313.871	28,12	5
Rp	1.580.180.760.758	28,09	5
Rp	1.705.936.346.935	28,17	5
Rp	1.112.399.051.891	27,74	5
Rp	2.220.359.504.220	28,43	5
Rp	1.042.026.366.106	27,67	5
Rp	1.163.494.102.231	27,78	5
Rp	1.300.741.604.588	27,89	5
Rp	1.159.695.545.966	27,78	5
Rp	1.314.901.386.618	27,90	5
Rp	1.239.694.546.471	27,85	5
Rp	1.109.541.013.888	27,73	5
Rp	1.346.000.378.535	27,93	5
Rp	1.133.467.029.870	27,76	5
Rp	1.046.282.914.607	27,68	5
Rp	1.578.603.965.100	28,09	5
Rp	740.864.563.093	27,33	5
Rp	1.834.483.998.041	28,24	5
Rp	2.958.060.291.946	28,72	5
Rp	1.648.414.553.340	28,13	5
Rp	2.434.360.114.053	28,52	5
Rp	1.918.481.263.913	28,28	5
Rp	1.419.173.692.318	27,98	5
Rp	3.488.244.426.631	28,88	5
Rp	850.890.467.678	27,47	5
Rp	655.603.214.054	27,21	5
Rp	859.995.202.223	27,48	5
Rp	1.992.040.769.576	28,32	5
Rp	1.374.234.887.679	27,95	5
Rp	1.614.913.933.936	28,11	5

Rp 1.228.203.115.854	27,84	5
Rp 968.083.615.710	27,60	5
Rp 1.359.663.868.000	27,94	5
Rp 867.583.014.236	27,49	5
Rp 889.754.016.297	27,51	3
Rp 1.154.173.650.994	27,77	5
Rp 1.100.781.278.574	27,73	5
Rp 1.035.960.297.263	27,67	5
Rp 739.851.796.955	27,33	3
Rp 886.515.895.131	27,51	3
Rp 890.000.156.784	27,51	5
Rp 672.702.191.099	27,23	5
Rp 673.637.092.504	27,24	5
Rp 733.986.405.604	27,32	3
Rp 1.109.753.247.080	27,74	5
Rp 1.974.307.248.247	28,31	5
Rp 2.388.867.281.595	28,50	5
Rp 1.677.655.829.986	28,15	5
Rp 2.002.789.116.452	28,33	5
Rp 1.527.711.794.513	28,05	5
Rp 1.182.413.916.744	27,80	5
Rp 1.501.095.281.556	28,04	5
Rp 2.190.205.773.409	28,42	5
Rp 870.142.022.924	27,49	5
Rp 1.340.306.936.858	27,92	5
Rp 1.159.675.730.787	27,78	5
Rp 812.860.322.642	27,42	3
Rp 966.957.669.034	27,60	5
Rp 797.058.152.359	27,40	3
Rp 1.072.744.879.105	27,70	5
Rp 936.660.954.749	27,57	3
Rp 883.544.427.974	27,51	5
Rp 895.183.802.837	27,52	3
Rp 869.574.985.820	27,49	5
Rp 820.048.919.890	27,43	3
Rp 815.705.531.388	27,43	3
Rp 907.677.696.764	27,53	5
Rp 818.907.266.366	27,43	5
Rp 1.355.301.755.745	27,94	5
Rp 2.381.523.875.914	28,50	5
Rp 836.674.603.417	27,45	5
Rp 784.989.431.435	27,39	5
Rp 1.088.638.083.810	27,72	5

Variables in the Equation

	B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)	95% C.I. for EXP(B)	
							Lower	Upper
Step 1 ^a	X1	.001	.008	.004	1	.950	1.001	.984 1.017
	X2	-.003	.005	.453	1	.501	.997	.988 1.006
	X3	.764	.664	1.324	1	.250	2.147	.584 7.892
	X4	.004	.013	.080	1	.777	1.004	.979 1.029
	X5	.818	.512	2.550	1	.110	2.266	.830 6.183
	Constant	-9.440	18.792	.252	1	.615	.000	

a. Variable(s) entered on step 1: X1, X2, X3, X4, X5.

Iteration History^{a,b,c}

Iteration	-2 Log likelihood	Coefficients
		Constant
Step 0	1	129.025 -1.429
	2	126.346 -1.752
	3	126.316 -1.791
	4	126.316 -1.792

- a. Constant is included in the model.
- b. Initial -2 Log Likelihood: 126,316
- c. Estimation terminated at iteration number 4 because parameter estimates changed by less than ,001.

Hosmer and Lemeshow Test

Step	Chi-square	df	Sig.
1	4.151	8	.843

Model Summary

Step	-2 Log likelihood	Cox & Snell R Square	Nagelkerke R Square
1	120.063 ^a	.040	.071

a. Estimation terminated at iteration number 6 because parameter estimates changed by less than ,001.

Variables in the Equation

	B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)
Step 0 Constant	-1.792	.230	60.539	1	.000	.167

Iteration History^{a,b,c,d}

Iteration	-2 Log likelihood	Coefficients					
		Constant	X1	X2	X3	X4	X5
1	125.633	-2.851	.000	-.001	.362	.001	.221
2	120.716	-5.815	.000	-.002	.637	.002	.492
3	120.103	-8.548	.000	-.003	.746	.003	.723
4	120.063	-9.379	.001	-.003	.763	.004	.809
5	120.063	-9.440	.001	-.003	.764	.004	.818
6	120.063	-9.440	.001	-.003	.764	.004	.818

a. Method: Enter

b. Constant is included in the model.

c. Initial -2 Log Likelihood: 126,316

d. Estimation terminated at iteration number 6 because parameter estimates changed by less than ,001.

Omnibus Tests of Model Coefficients

	Chi-square	df	Sig.
Step	6.253	5	.282
Step 1 Block	6.253	5	.282
Model	6.253	5	.282